RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2026

Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemerintah Kota Bogor

SALINAN

WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2025-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kota Bogor Nomor 61);
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 81);
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 151);

12. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2 (dua) tahun.
8. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

10. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada tahun 2022 atau 2023.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
14. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
15. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
16. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
17. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/ program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

a. sistematika rencana strategis;
b. pengendalian dan evaluasi; dan
c. perubahan rencana strategis.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah dalam Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

a. Sekretariat Daerah;
b. Sekretariat DPRD;
c. Inspektorat Daerah;
d. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
f. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
g. Badan Pendapatan Daerah;
h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
j. Dinas Pendidikan;
k. Dinas Kesehatan;
l. Dinas Sosial;
m. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
n. Dinas Lingkungan Hidup;
o. Dinas Komunikasi dan Informatika;
p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
r. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
s. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
t. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
u. Satuan Polisi Pamong Praja;
v. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
w. Dinas Arsip dan Perpustakaan;
x. Dinas Tenaga Kerja;
y. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
z. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
aa. Dinas Perhubungan;
bb. Dinas Perumahan dan Permukiman;
cc. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
dd. Kecamatan Bogor Tengah;
ee. Kecamatan Bogor Selatan;
ff. Kecamatan Bogor Barat;
gg. Kecamatan Bogor Utara;
hh. Kecamatan Bogor Timur; dan
ii. Kecamatan Tanah Sareal.

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS

Pasal 4

(1) Sistematika Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
    a. BAB I : Pendahuluan;
    b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
    c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
    d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;
f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
h. BAB VIII : Penutup.

(2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah masing-masing.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah masing-masing.
(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah masing-masing.
(4) Pemantauan dan supervisi bagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran Renstra Perangkat Daerah masing-masing.
(5) Tata cara pengendalian pelaksanaan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

Pasal 6

(1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila ada perubahan RPJMD.
(2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam perubahan Renja Perangkat Daerah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

(1) Sebelum Renstra Perangkat Daerah periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun pertama periode pemerintahan Wali Kota terpilih berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 13 Juni 2024

Pj. WALI KOTA BOGOR,

TTD.

HERY ANTASARI

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 13 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

TTD.

SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2024 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

KOTA BOGOR

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ALMA WIRANTA, S.H., M.SI (HAN)
Pembina Tk.I

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR : 17 Tahun 2024
TANGGAL : 13 Juni 2024
TENTANG : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Seiring dengan perkembangan era teknologi informasi yang sangat cepat membawa implikasi yang sangat luas pada segenap aspek kehidupan masyarakat. Percepatan pertukaran informasi, peningkatan tuntutan layanan publik yang lebih efisien, keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan mendorong penerapan konsep kota cerdas (*smart city*) guna menjawab tantangan tersebut.

Dalam rangka menuju dunia informasi global yang mengedepankan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah dituntut untuk aktif memfasilitasi proses akselerasi penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di segala sektor. Sehingga akan tercipta peningkatan efisiensi dan efektivitas di bidang pemerintahan sekaligus pelayanan kepada masyarakat.

Pesatnya informasi global kini tidak hanya merambah di wilayah perkotaan saja, tetapi telah sampai ke wilayah pelosok pedesaan sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Diharapkan peran TIK dapat menciptakan tercapainya keadilan, kemudahan, transparansi, dan akuntabilitas layanan pemerintah kepada publik.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik menjadi garda terdepan untuk mengoordinasikan implementasi *smart city*. Dalam rangka mengawal program *smart city* melalui implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dan seluruh ekosistem pendukungnya perlu disusun dokumen perencanaan untuk memberikan arah pelaksanaan dari fungsi dan urusan yang diampu.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor mengacu pada dokumen RPJMD Kota Bogor serta mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti RTRW, Renstra Kementerian Kominfo, Renstra Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat dan sejumlah dokumen terkait lainnya.

RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024, telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019- 2024. Seiring dengan dinamika politik dalam negeri di mana ketentuan penyelenggaraan pemilu kepala daerah memberikan dampak terhadap adanya kekosongan kepala daerah definitif pada tahun 2024 dan 2025, maka dianggap perlu untuk disusunnya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor Tahun 2025-2026 baik dalam hal arah kebijakan, strategi maupun prioritas pembangunan daerah Kota Bogor tanpa adanya arahan visi dan misi kepala daerah terpilih/definitif.

Dengan berakhirnya RPJMD Kota Bogor di tahun 2024, maka berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada tahun 2024, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026 yang berlaku selama 2 (dua) tahun di masa transisi hingga terpilihnya Kepala Daerah baru yang akan memberikan visi dan misi arah pembangunan pada perencanaan pembangunan di tahun 2027 dan seterusnya. Selanjutnya perangkat daerah secara simultan berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang sejalan dengan mengacu kepada RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Renstra Diskominfo Kota Bogor Tahun 2025-2026 adalah:

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor .... Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada Tahun 2024;
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 8 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 118);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Informatika dan Komunikasi (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 5 Seri E);

18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Noreg Peraturan Daerah Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat: (6/133/2021);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019- 2024;
21. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan e-Government (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 59 Seri E);
22. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 42 Tahun 2022 Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2024;
23. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
24. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 130 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud penyusunan perencanaan strategis 2025-2026 adalah untuk mengisi kekosongan arah pembangunan di daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah sebagai akibat dari kebijakan politik dalam negeri terkait penyelenggaraan pemilu kepala daerah sehingga membutuhkan penyelarasan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kurun waktu 2 (dua) tahun mengacu kepada RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2025-2026 sebagai berikut:

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan indikasi kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor beserta indikator kinerja dan target kinerja pada Tahun 2025-2026, sinkron dengan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026;
2. Memberikan pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor dalam rangka menyusun Rencana Kerja Tahunan;
3. Menetapkan tolok ukur dan target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor khususnya dalam pelaksanaan tugas urusan pemerintahan di bidangnya, yang harus dipertanggungjawabkan dalam dokumen LAKIP, LPPD dan LKPJ tahunan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	Pendahuluan	Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan
BAB II	Gambaran Pelayanan	Memuat tugas, fungsi, dan struktur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor; sumber daya; kinerja pelayanan dan kelompok sasaran layanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor
BAB III	Permasalahan dan Isu Strategis	Memuat permasalahan pelayanan dan Isu strategis pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor
BAB IV	Tujuan dan Sasaran	Memuat penentuan tujuan dan sasaran memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026 serta NSPK; dan *Cascading* kinerja mulai dari tujuan sampai dengan *outcome* dan *output*
BAB V	Strategi dan Arah Kebijakan	Memuat strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor
BAB VI	Rencana Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan	Menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagunya (nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur terkait dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan dan pemutakhirannya).
BAB VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	Memuat Indikator Kinerja Umum dan Indikator Kinerja Khusus Tahun 2025-2026 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor
BAB VIII	Penutup	

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor diatur dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 130 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika. Sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Adapun tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor sebagai berikut:

2.1.1. Tugas dan Fungsi

1. Kepala Dinas

Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian.

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, membina, monitoring, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan fungsi urusan pemerintahan daerah bidang pengelolaan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan dan perumusan kebijakan di pengelolaan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;

d. pelaksanaan administrasi di bidang pengelolaan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai di bidang pengelolaan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pengelolaan kesekretariatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja di lingkup Dinas;
b. pelaksanaan tugas administrasi keuangan di lingkup Dinas;
c. pelaksanaan tugas administrasi barang milik daerah, administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengadaan Barang Milik Daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dan pemeliharaan Barang Milik Daerah di lingkup Dinas; dan
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup Dinas.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di Bidang Umum dan Kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan kepegawaian;

b. pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan di lingkungan Dinas; dan
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

4. Bidang Statistik Sektoral

Bidang Statistik Sektoral dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di Bidang Statistik Sektoral.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Bidang Statistik Sektoral mempunyai fungsi:

a. perumusan konsep kebijakan daerah di Bidang Statistik Sektoral;
b. penyusunan rencana kerja di Bidang Statistik Sektoral;
c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di Bidang Statistik Sektoral;
d. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Statistik Sektoral;
e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Statistik Sektoral;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Statistik Sektoral; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

5. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:

a. perumusan konsep kebijakan daerah di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
b. penyusunan rencana kerja di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;

d. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

6. Bidang Jaringan, Domain dan Persandian

Bidang Jaringan, Domain dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di Bidang Jaringan, Domain dan Persandian.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Bidang Jaringan, Domain dan Persandian mempunyai fungsi:

a. perumusan konsep kebijakan daerah di Bidang Jaringan, Domain dan Persandian;
b. penyusunan rencana kerja di Bidang Jaringan, Domain dan Persandian;
c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di Bidang Jaringan, Domain dan Persandian;
d. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Jaringan, Domain dan Persandian;
e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Jaringan, Domain dan Persandian;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Jaringan, Domain dan Persandian; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

7. Bidang *e-Government*

Bidang *e-Government* dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di Bidang *e-Government*.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Bidang *e-Government* mempunyai fungsi:

a. perumusan konsep kebijakan daerah di Bidang *e-Government*;
b. penyusunan rencana kerja di bidang *e-Government*;
c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di Bidang *e-Government*;
d. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang *e-Government*;
e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang *e-Government*;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di *e-Government*; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan keahlian, keterampilan, dan kebutuhan Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dengan satuan organisasi dalam lingkup Dinas dan memiliki kewajiban yang sama dengan satuan organisasi dalam lingkup Dinas.

2.1.2. Struktur Organisasi

Sejalan dengan dinamika kebijakan penyederhanaan birokrasi, maka Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor dan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian, termasuk ke dalam Dinas Tipe A.

Gambar 2.1.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
(Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah)

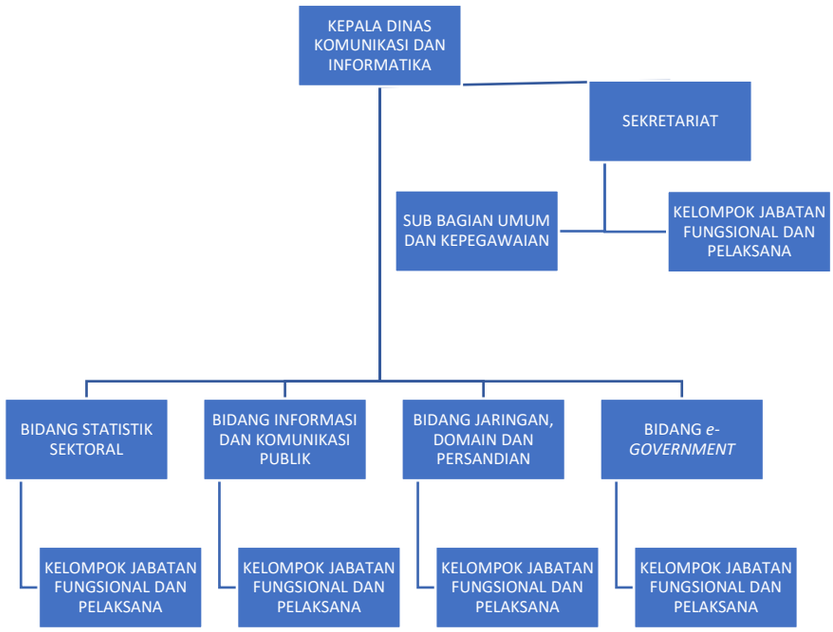

Sumber: Diskominfo Kota Bogor Tahun 2023

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika didukung dengan sumber daya sebagai berikut:

2.2.1.Sumber Daya Manusia

1. Berdasarkan Jenis Kelamin:

Tabel 2.1
Kondisi Kepegawaian berdasarkan Jenis Kelamin

Jabatan Pegawai	Jenis Kelamin	
	Perempuan	Laki-Laki
Kepala Dinas		1
Sekretaris		1
Kepala Bidang	1	3
Kepala Seksi/Sub Bagian	1	

Jabatan Pegawai	Jenis Kelamin	
	Perempuan	Laki-Laki
Jabatan Fungsional Tertentu	9	14
Pelaksana	12	11
JUMLAH TOTAL	**23**	**30**
	53	

Sumber: Diskominfo Kota Bogor Tahun 2023

2. Berdasarkan Eselon Jabatan dan Golongan:

Tabel 2.2
Kondisi Kepegawaian berdasarkan Eselon Jabatan dan Golongan

No	Jabatan Pegawai	Eselon	Golongan I				Golongan II				Golongan III				Golongan IV				PPPK	Jumlah
			a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d		
1	Kepala Dinas	IIa															1			1
2	Sekretaris	IIIa													1					1
3	Kepala Bidang	IIIb												1	3					4
4	Kepala Sub Bagian	IVa													1					1
5	Kepala Seksi	IVa																		
6	Jabatan Fungsional Tertentu	-									1	2	4	8	4				4	23
7	Pelaksana	-							1	4	5	8	2	2	1					23
Jumlah									**6**	**4**	**5**	**10**	**4**	**3**	**5**		**1**		**4**	**53**

Sumber: Diskominfo Kota Bogor Tahun 2023

3. Berdasarkan Pendidikan yang ditamatkan:

Tabel 2.3
Kondisi Kepegawaian berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

Jabatan Pegawai	Pendidikan									Jumlah
	SD	SMP	SMA	D1	D3	D4	S1	S2	S3	
Kepala Dinas								1		1
Sekretaris							1			1
Kepala Bidang								4		4
Kepala Seksi/ Sub Bagian								1		1
Jabatan Fungsional Tertentu					2		13	8		23
Pelaksana			3		6		13	1		23
TOTAL										**53**

Sumber: Diskominfo Kota Bogor Tahun 2023

4. Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor:

Tabel 2.4
Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia

No	Nama Jabatan	Jumlah Kondisi SDM (s.d Semester 2 Tahun 2023)			Jumlah Kebutuhan SDM s.d Tahun 2025		Jumlah Pemenuhan SDM s.d Tahun 2026	
		PNS	P3K	NON PNS	PNS	P3K	PNS	P3K
1	**Kepala**	1	-	-	1	-	1	-
2	**Sekretaris**	1	-	-	1	-	1	-
	Perencana Muda	1	-	-	1	-	1	-
	Perencana Pertama	-	-	-	1	-	1	-
	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	-	-	-	1	-	1	-
	Pengelola bahan perencanaan	-	-	-	1	-	1	-
	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	1	-	-	1	-	1	-
	Bendahara	1	-	-	1	-	1	-
	Pengelola Keuangan	-	-	-	1	-	1	-
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	-	-	1	-	1	-
	Arsiparis Mahir	-	-	-	1	-	1	-
	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	2			2	-	2	-
	Analis Aset Daerah	1	-	-	1	-	1	-
	Pengelola Rumah Tangga	1	-	-	1	-	1	-
	Pengadministrasi Umum	2	-	-	3	-	3	-
3	**Kepala Bidang Statistik Sektoral**	1	-	-	1	-	1	-
	Analis Kebijakan Madya	-	-	-	1	-	1	-
	Analis Kebijakan Muda	1	-	-	1	-	1	-
	Pranata Komputer Madya	-	-	-	1	-	1	-
	Pranata Komputer Muda	1	-	-	1	-	1	-
	Statistisi Madya	-	-	-	2	-	2	-
	Statistisi Muda	1	-	-	4	-	4	-
	Statistisi Pertama	-	1		4	-	4	-
	Statistisi Penyelia	-	-	-	2	-	2	-
	Statistisi Mahir	-	-	-	2	-	2	-
	Statistisi Terampil	-	-	-	2	-	2	-
	Analis Data dan Informasi	-	-	-	2	-	2	-
	Analis Statistik	2	-	-	4	-	4	-
	Analis Sistem Informasi	-	-	-	1	-	1	-
	Operator Komputer Grafis	-	-	1	1	-	1	-

No	Nama Jabatan	Jumlah Kondisi SDM (s.d Semester 2 Tahun 2023)			Jumlah Kebutuhan SDM s.d Tahun 2025		Jumlah Pemenuhan SDM s.d Tahun 2026	
		PNS	P3K	NON PNS	PNS	P3K	PNS	P3K
	Pengelola Data Statistik	-	-	1	1	-	1	-
4	**Kepala Bidang *e-Government***	1	-	-	1	-	1	-
	Analis Kebijakan Madya	-	-	-	1	-	1	-
	Analis Kebijakan Muda	1	-	-	1	-	1	-
	Pranata Komputer Madya	-	-	-	2	-	2	-
	Pranata Komputer Muda	4	-	-	8	-	8	-
	Pranata Komputer Pertama	-	1	2	3	-	3	-
	Pranata Komputer Penyelia	-	-		2	-	2	-
	Pranata Komputer Mahir	2	-		2	-	2	-
	Pranata Komputer Terampil	-	-	1	5	-	5	-
	Analis Sistem Informasi dan Diseminasi Hukum	1	-	-	2	-	2	-
	Penyuluh Teknik Informatika	-	-	-	1	-	1	-
	Pengendali Teknologi Informasi	-	-	10	12	-	12	-
	Analis Sistem Informasi	1	-	2	3	-	3	-
	Pengelola Instalasi Teknologi Informasi	-	-	-	3	-	3	-
	Pengolah Data	1	-	-	3	-	3	-
	Pengelola Sistem dan Jaringan	-	-	-	1	-	1	-
	Pengelola Situs/Web	1			2		2	-
	Operator Komputer Grafis	-	-	-	3	-	3	-
	Pengelola Database	1	-	-	4		4	-
5	**Kepala Bidang Jaringan, Domain dan Persandian**	1	-	-	1	-	1	-
	Analis Kebijakan Madya	-	-	-	1		1	-
	Analis Kebijakan Muda	1	-	-	1		1	-
	Sandiman Muda	-	-	-	2		2	-
	Sandiman Pertama	-	-	-	2		2	-
	Sandiman Penyelia	-	-	-	1		1	-
	Sandiman Mahir	-	-	-	1		1	-

No	Nama Jabatan	Jumlah Kondisi SDM (s.d Semester 2 Tahun 2023)			Jumlah Kebutuhan SDM s.d Tahun 2025		Jumlah Pemenuhan SDM s.d Tahun 2026	
		PNS	P3K	NON PNS	PNS	P3K	PNS	P3K
	Sandiman Terampil	-	-	-	1		1	-
	Pranata Komputer Madya	-	-	-	1		1	-
	Pranata Komputer Muda	2	-	-	4		4	-
	Pranata Komputer Pertama	-	1	1	2	-	2	-
	Pranata Komputer Penyelia	-	-	-	1	-	1	-
	Pranata Komputer Mahir	-	-	-	1	-	1	-
	Pengendali Teknologi Informasi	-	-	-	3	-	3	-
	Pengendali Jaringan Komunikasi	-	-	-	3	-	3	-
	Analis Persandian	-	-	-	1	-	1	-
	Pengelola Sistem dan Jaringan	-	-	3	3	-	3	-
	Pengelola Teknologi Informasi	1	-	-	3	-	3	-
	Pengolah Data	1	-	-	2	-	2	-
	Pengolah Informasi dan Komunikasi	-	-	-	2	-	2	-
	Pengelola Keamanan Sistem Informasi	1	-	-	2	-	2	-
	Operator Sandi dan Telekomunikasi	-	-		1	-	1	-
6	**Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**	1	-	-	1	-	1	-
	Pranata Hubungan Masyarakat Madya	-		-	2	-	2	-
	Pranata Hubungan Masyarakat Muda	3		-	8	-	8	-
	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	-	1	-	2	-	2	-
	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	-	-	-	2	-	2	-
	Pranata Hubungan Masyarakat Mahir	-	-	-	2	-	2	-
	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	-	-	1	2	-	2	-
	Analis Sistem Informasi dan Desiminasi Hukum	1	-		1	-	1	-
	Analis Publikasi	1	-		2	-	2	-
	Perancang Grafis	-	-	2	2	-	2	-
	Analis Kemitraan	1	-		2	-	2	-
	Analis Humas	2	-		2	-	2	-

No	Nama Jabatan	Jumlah Kondisi SDM (s.d Semester 2 Tahun 2023)			Jumlah Kebutuhan SDM s.d Tahun 2025		Jumlah Pemenuhan SDM s.d Tahun 2026	
		PNS	P3K	NON PNS	PNS	P3K	PNS	P3K
	Pengelola TV dan Radio	-	-		3	-	3	-
	Pengelola Situs/Web	-	-	2	2	-	2	-
	Penata Liputan	-	-	3	3	-	3	-
	Operator Radio	-	-		1	-	1	-
	Pengelola Pengaduan Publik	-	-	10	12	-	12	-
	Pengolah Data Sistem Informasi dan Diseminasi Hukum	-	-	1	2	-	2	-
	Pengelola Data Tata Organisasi dan Tata Laksana	-	-	-	1	-	1	-
	Pengelola Media Center dan Kemitraan Media	-	-	-	1	-	1	-
	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	1	-	-	1	-	1	-

Sumber: Diskominfo Kota Bogor Tahun 2023

5. Rencana Kebutuhan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor

Tabel 2.5
Rencana Kebutuhan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia

No	Nama Jabatan	Jumlah SDM yang Sudah Mengikuti Diklat (s.d Semester 2 Tahun 2023)			Rencana Jumlah SDM yang Diusulkan Mengikuti Diklat (s.d Tahun 2026)		
		Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya	Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya
1	**Kepala**	-	-	-	-	1	-
2	**Sekretaris**	-	-	-	1	1	1
	Perencana Muda	-	-	-	1	-	1
	Perencana Pertama	-	-	-	1	-	1
	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	-	-	-	1	1	1
	Pengelola bahan perencanaan	-	-	-	1	1	1
	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	-	-	-	-	-	-
	Bendahara	-	-	-	1	1	1

No	Nama Jabatan	Jumlah SDM yang Sudah Mengikuti Diklat (s.d Semester 2 Tahun 2023)			Rencana Jumlah SDM yang Diusulkan Mengikuti Diklat (s.d Tahun 2026)		
		Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya	Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya
	Pengelola Keuangan	-	-	-	1	1	1
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	-	-	-	1	1	1
	Arsiparis Mahir	-	-	-	1	1	1
	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	-	-	-	1	1	1
	Analis Aset Daerah	-	-	1	1	-	-
	Pengelola Rumah Tangga	-	-	-	1	1	1
	Pengadministrasi Umum	-	-	-	1	1	1
3	**Kepala Bidang Statistik Sektoral**	-	1	1	1	-	1
	Analis Kebijakan Madya	-	-	-	1	1	1
	Analis Kebijakan Muda	-	-	-	1	1	1
	Pranata Komputer Madya	-	-	-	1	1	1
	Pranata Komputer Muda	-	-	-	1	1	1
	Statistisi Madya	-	-	-	1	1	1
	Statistisi Muda	-	-	-	1	1	1
	Statistisi Pertama	-	-	-	1	1	1
	Statistisi Penyelia	-	-	-	1	1	1
	Statistisi Mahir	-	-	-	1	1	1
	Statistisi Terampil	-	-	-	1	1	1
	Analis Data dan Informasi		-	-	1	1	1
	Analis Statistik	1	-	-	1	1	1
	Analis Sistem Informasi	-	-	-	1	1	1
	Operator Komputer Grafis	-	-	-	1	1	1
	Pengelola Data Statistik	-	-	-	1	1	1
4	**Kepala Bidang *e-Government***	-	-	-	1	1	1
	Analis Kebijakan Madya	-	-	-	1	1	1
	Analis Kebijakan Muda	-	-	-	1	1	1
	Pranata Komputer Madya	-	-	-	1	1	1
	Pranata Komputer Muda	-	-	-	1	1	1

No	Nama Jabatan	Jumlah SDM yang Sudah Mengikuti Diklat (s.d Semester 2 Tahun 2023)			Rencana Jumlah SDM yang Diusulkan Mengikuti Diklat (s.d Tahun 2026)		
		Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya	Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya
	Pranata Komputer Pertama	-	-	-	1	1	1
	Pranata Komputer Penyelia	-	-	-	1	1	1
	Pranata Komputer Mahir	-	-	-	1	1	1
	Pranata Komputer Terampil	-	-	-	1	1	1
	Analis Sistem Informasi dan Diseminasi Hukum	-	-	-	1	1	1
	Penyuluh Teknik Informatika	-	-	-	1	1	1
	Pengendali Teknologi Informasi	-	-	-	1	1	1
	Analis Sistem Informasi	-	-	-	1	1	1
	Pengelola Instalasi Teknologi Informasi	-	-	-	1	1	1
	Pengolah Data	-	-	-	1	1	1
	Pengelola Sistem dan Jaringan	-	-	-	1	1	1
	Pengelola Situs/Web	-	-	-	1	1	1
	Operator Komputer Grafis	-	-	-	1	1	1
	Pengelola Database	-	-	-	1	1	1
5	**Kepala Bidang Jaringan, Domain dan Persandian**	-	-	-	1	1	1
	Analis Kebijakan Madya	-	-	-	1	1	1
	Analis Kebijakan Muda	1			1	1	1
	Sandiman Muda	-	-	-	1	1	1
	Sandiman Pertama	-	-	-	1	1	1
	Sandiman Penyelia	-	-	-	1	1	1
	Sandiman Mahir	-	-	-	1	1	1
	Sandiman Terampil	-	-	-	1	1	1
	Pranata Komputer Madya	-	-	-	1	1	1
	Pranata Komputer Muda	-	-	-	1	1	1
	Pranata Komputer Pertama	-	-	-	1	1	1
	Pranata Komputer Penyelia	-	-	-	1	1	1
	Pranata Komputer Mahir	-	-	-	1	1	1

No	Nama Jabatan	Jumlah SDM yang Sudah Mengikuti Diklat (s.d Semester 2 Tahun 2023)			Rencana Jumlah SDM yang Diusulkan Mengikuti Diklat (s.d Tahun 2026)		
		Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya	Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya
	Pengendali Teknologi Informasi	1			1	1	1
	Pengendali Jaringan Komunikasi	-	-	-	1	1	1
	Analis Persandian	-	-	-	1	1	1
	Pengelola Sistem dan Jaringan	-	-	-	1	1	1
	Pengelola Teknologi Informasi	-	-	-	1	1	1
	Pengolah Data	1			1	1	1
	Pengolah Informasi dan Komunikasi	-	-	-	1	1	1
	Pengelola Keamanan Sistem Informasi	-	-	-	1	1	1
	Operator Sandi dan Telekomunikasi	-	-	-	1	1	1
6	**Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**	-	-	-	1	1	1
	Pranata Hubungan Masyarakat Madya	-	-	-	1	1	1
	Pranata Hubungan Masyarakat Muda	-	-	-	1	1	1
	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	-	-	-	1	1	1
	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	-	-	-	1	1	1
	Pranata Hubungan Masyarakat Mahir	-	-	-	1	1	1
	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	-	-	-	1	1	1
	Analis Sistem Informasi dan Diseminasi Hukum	-	-	-	1	1	1
	Analis Publikasi	-	-	-	1	1	1
	Perancang Grafis	-	-	-	1	1	1
	Analis Kemitraan	-	-	-	1	1	1
	Analis Humas	-	-	-	1	1	1
	Pengelola TV dan Radio	-	-	-	1	1	1
	Pengelola Situs/Web	-	-	-	1	1	1
	Penata Liputan	-	-	-	1	1	1
	Operator Radio	-	-	-	1	1	1

No	Nama Jabatan	Jumlah SDM yang Sudah Mengikuti Diklat (s.d Semester 2 Tahun 2023)			Rencana Jumlah SDM yang Diusulkan Mengikuti Diklat (s.d Tahun 2026)		
		Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya	Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya
	Pengelola Pengaduan Publik	-	-	-	1	1	1
	Pengolah Data Sistem Informasi dan Diseminasi Hukum	-	-	-	1	1	1
	Pengelola Data Tata Organisasi dan Tata Laksana	-	-	-	1	1	1
	Pengelola Media Center dan Kemitraan Media	-	-	-	1	1	1
	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	-	-	-	1	1	1

Sumber: Diskominfo Kota Bogor Tahun 2023

2.2.2.Sarana dan Prasarana

Tabel 2.6
Sarana dan Prasarana

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	Kendaraan Roda 4	7	Unit
2	Kendaraan Roda 2 Matic 150 cc	7	Unit
3	PC	54	Unit
4	Note Book	14	Unit
5	Printer inkjet	6	Unit
6	AC	42	Unit
7	Mesin Tik Elektrik	2	Unit
8	Mesin Penghancur	1	Unit
9	Dispenser	4	Unit
10	Kulkas 2 Pintu	2	Unit
12	Lemari Besi	2	Unit
13	Filling Cabinet	5	Unit
14	Kursi Kerja Putar	62	Unit
15	Meja Kerja	55	Unit
16	Kursi Tamu	2	Unit
19	Laptop (berbagai merk)	28	Unit
20	Hardisk External	8	Unit
21	Monitor 21.5	1	Unit
22	Proyektor	5	Unit
23	Layar Proyektor	3	Unit
24	Lemari Rak Arsip Kayu	17	Unit
25	Anjungan Informasi Publik	18	Unit
26	Server	20	Paket
27	Genset	1	Unit
28	CCTV Taman Kota	7	Unit

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan
29	CCTV Monitoring	34	Unit
30	Handy Talky	23	Unit
32	Action Camera	1	Unit
33	Camera	5	Unit
34	Tripod	5	Unit
35	Printer Epson	20	Unit
36	Lemari Locker	1	Unit
37	Microphone Headset	17	Unit
39	Pengadaan jaringan FO Intranet Kota Bogor Jalur Bogor Barat dan Jalur Kelurahan Loji	1	Paket
40	Jaringan FO Intranet Kota Bogor Jalur TanahSareal Rute Sukaresmi-Sukadamai	1	Paket
41	Pengadaan jaringan FO Intranet Kota Bogor Closure Cipaku – Pamoyanan	1	Paket
42	Pengadaan jaringan FO Intranet Kota Bogor Rute Cibuluh - Tanah Baru	1	Paket
43	Pengadaan jaringan FO Intranet Kota Bogor Closure PUPR dan BPKSDA (Gedung Baru)	1	Paket

Sumber: DiskominfoKota Bogor Tahun 2023

Tabel 2.7
Rencana Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Dinas
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor

No	Nama Barang	Jumlah Kondisi Saat Ini			Jumlah Rencana Pemeliharaan					Jumlah Kondisi Akhir
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2024	2025	2026	2027	2028	
1	Gedung untuk Kantor Baru	1	-	-	-	1	1	1	1	1
2	Mobil	6	-	-	6	6	6	6	6	6
3	Sepeda Motor	8	-	-	8	8	8	8	8	8
4	PenghancurKertas	1	1	-	1	2	3	4	5	1
5	Meja	51	4	11	51	51	51	51	51	51
6	Kursi Sandaran Sedang	61	1	16	61	61	61	61	61	61
7	PenghancurKertas	1	1	-	1	1	1	1	1	1
8	LemariBesi	3	-	-	3	3	3	3	3	3
9	Filling Kabinet	5	-	-	5	5	5	5	5	5
10	RakArsipBesi	0	-	-	-	-	-	-	-	-
11	AC	42	-	2	42	42	42	42	42	42
12	Lemari Pendingin /Kulkas	3	-	-	3	3	3	3	3	3
13	Dispenser	3	-	1	3	3	3	3	3	3
14	Lemari Kayu	12	-	1	12	12	12	12	12	12
15	KursiHadap	10	-	-	10	10	10	10	10	10
16	Personal Komputer	52	2	7	52	52	52	52	52	52
17	Laptop	42	1	1	42	42	42	42	42	42
18	Printer Scanner	26	-	1	26	26	26	26	26	26
19	Tripod	2	-	-	2	2	2	2	2	2
20	Sound System Outdoor	0	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Kompor Gas	1	-	-	1	1	1	1	1	1
22	Server Blade center S PC 1	1	-	-	1	1	1	1	1	1
23	Server Blade center S PC 2	1	-	-	1	1	1	1	1	1
24	Server Blade center S PC 3	1	-	-	1	1	1	1	1	1

No	Nama Barang	Jumlah Kondisi Saat Ini			Jumlah Rencana Pemeliharaan					Jumlah Kondisi Akhir
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2024	2025	2026	2027	2028	
25	Server Blade center S PC 4	1	-	-	1	1	1	1	1	1
26	Server Blade center S PC 5	1	-	-	1	1	1	1	1	1
27	Server Blade center S PC 6	1	-	-	1	1	1	1	1	1
28	Server Blade center H PC 1	1	-	-	1	1	1	1	1	1
29	Server Blade center H PC 2	1	-	-	1	1	1	1	1	1
30	Server Blade center H PC 3	1	-	-	1	1	1	1	1	1
31	Server Blade center H PC 4	1	-	-	1	1	1	1	1	1
32	Xen Server DNS	-	1	-	-	-	-	-	-	-
33	Rack 42u1	1	-	-	1	1	1	1	1	1
34	Rack 42u2	1	-	-	1	1	1	1	1	1
35	Rack 42u3	1	-	-	1	1	1	1	1	1
36	Rack 42u4	1	-	-	1	1	1	1	1	1
37	Rack 30u	1	-	-	1	1	1	1	1	1
38	UPS arakawa	1	-	-	1	1	1	1	1	1
39	UPS Emerson	1	-	-	1	1	1	1	1	1
40	KVM Oxca	1	-	-	1	1	1	1	1	1
41	Storage Lbm	1	-	-	1	1	1	1	1	1
42	Fiber Optik	1	-	-	1	1	1	1	1	1
43	WifiPublik	1	-	-	1	1	1	1	1	1
44	Wireless	1	-	-	1	1	1	1	1	1
45	Pen Tab	-	-	-	-	-	1	-	1	1
46	Kamera	3	1	-	3	3	3	3	3	3
47	Drone									
48	Jammer	2	-	-	2	2	2	2	2	2
49	Metal Detector									
50	Bug detector	1	-	-	1	1	1	1	1	1
51	Radio HT	2	-	21	2	2	2	2	2	2
52	Firewall (Software)	1	-	-	1	1	1	1	1	1
53	AntiVirus (Software)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Operation System Windows (Software)	-	-	-	1	1	1	1	1	1
55	Microsoft Office (Software)	-	-	-	1	1	1	1	1	1
56	Hard Disk External	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Televisi	1	-	-	-	1	-	-	-	-
58	Sofa (full set)	-	-	-	1	-	-	-	-	-
59	Camera Handycam	2	-	-	1	-	-	1		
60	Lensa	1	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Drone DJI Phantom	-	-	1	-	-	-	-	-	-
62	Tripod	5	-	-	5	5	5	5	5	5
63	Clip on Wireless	4	-	-	4	4	4	4	4	4
65	Video Sender	1	-	-	1	1	1	1	1	1
66	LampuAputure	1	-	-	1	1	1	1	1	1
67	Camera Canon 70D	1	-	-	1	1	1	1	1	1
68	Camera DSLR	3	-	-	3	3	3	3	3	3
69	Drone Mavic Pro	1	-	-	1	1	1	1	1	1
70	Imac	3	-	-	3	3	3	3	3	3
71	Vmix Live	1	-	-	1	1	1	1	1	1
72	Camcorder	3	-	-	3	3	3	3	3	3
73	High chair	2	-	-	2	2	2	2	2	2
74	Lisensi Sistem Opr. Windows	1	-	-	1	1	1	1	1	1
75	Lisensi Virus	1	-	-	1	1	1	1	1	1
76	Lisensi SSL	1	-	-	1	1	1	1	1	1
77	Lisensi Firewall	1	-	-	1	1	1	1	1	1
78	CCTV (Paket)	31	-	16	31	31	31	31	31	31
79	Grounding (1 Paket)	1	-	-	1	1	1	1	1	1

Sumber: Diskominfo Kota Bogor Tahun 2023

Tabel 2.8
Rencana Pemenuhan Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor

No	Nama Barang	Jumlah Kondisi Saat Ini			Jumlah Rencana Pengadaan					Jumlah Kondisi Akhir
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2024	2025	2026	2027	2028	
	PENGADAAN BARANG									
1	Gedung untuk Kantor Baru	-	-	-	-	-	1	-	-	1
2	Mobil	7	-	-	-	2	-	-	-	2
3	Sepeda Motor	8	-	-	-					
4	Penghancur Kertas	1	-	2		2	1	1	1	5
5	Meja	51	4	11		4	3	3	3	13
6	Kursi Sandaran Sedang	61	1	16	10	12	10	7	6	45
7	Penghancur Kertas	1	1	-		2	1	1	-	4
8	Lemari Besi	3	-	-		3	3	3	2	11
9	Filling Kabinet	5	-	-	9	10	10	10	10	49
10	Rak Arsip Besi	0	-	-	1	4	4	2	1	12
	Lemari arsip					2	2	2	2	8
11	AC	18	-	2		10	3	2	2	17
12	Lemari Pendingin / Kulkas	3	-	-	2	1	-	1	-	4
13	Vacuum cleaner					1				1
14	Apar			2		10				10
15	Tangga lipat	1				1				1
16	Genset	1			1	1				1
17	CPU	10				1		1		2
18	Stabilizer listrik					1				1
19	sofa	1	-	-	-	4	1		1	6
20	Dispenser	3	-	1	1	1	1	2	2	7
21	Lemari Kayu	12	-	1	-	3	2	2	2	9
22	Kursi Hadap	10	-	-	-	8	4	4	4	20
23	Kursi putar	-				22				22
24	Kursi rapat futura					30				30
25	Personal Komputer	52	2	7	14	23	3	2	3	36
26	Laptop	32		10	5	14	4	6	7	36
27	Printer Scanner	26	-	1		2	1	1	1	4
28	Tripod	2	-	-	-	2	-	-	-	2
29	Sound System Outdoor	0	-	-	-	1	-	1	-	2
30	Kompor Gas	0	-	-	-	1	-	1	-	2
31	Server Blade center S PC 1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Server Blade center S PC 2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Server Blade center S PC 3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Server Blade center S PC 4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Server Blade center S PC 5	1	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Server Blade center S PC 6	1	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Server Blade center H PC 1	1	-	-	1	-	-	-	-	1
38	Server Blade center H PC 2	1	-	-	-	1	-	-	-	1
39	Server Blade center H PC 3	1	-	-	-	-	1	-	-	1
40	Server Blade center H PC 4	1	-	-	-	-	-	1	-	1
41	Xen Server DNS	-	1	-	-	-	1	-	-	1
42	Rack 42u1	1	-	-	-	1	-	-	-	1
43	Rack 42u2	1	-	-	-		1		-	1
44	Rack 42u3	1	-	-	1	-	-	1	-	2
45	Rack 42u4	1	-	-	-	-	-	-	1	1

No	Nama Barang	Jumlah Kondisi Saat Ini			Jumlah Rencana Pengadaan					Jumlah Kondisi Akhir
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2024	2025	2026	2027	2028	
46	Rack 30u	1	-	-	-	1	-	-	-	1
47	UPS ara kawa	1	-	-	1	-	-	-	-	1
48	UPS Emerson	1	-	-	-	1	1	-	1	3
49	KVM Oxca	1	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Storage Lbm	1	-	-	1	1	1	-	-	3
51	Fiber Optik	1	-	-	-	-	-	-	-	-
52	LCD	3			3			1		4
53	Wifi Publik	1	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Wireless	1	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Pen Tab	-	-	-	-	1	-	1	1	3
56	Kamera	3	1	-	-	3	-	4	3	10
57	Drone			5	-	2	-	2	-	4
58	Jammer	2	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Metal Detector	2	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Bug detector	1	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Radio HT	3	-	11	-		10		-	10
62	Firewall (Software)	1	-	-	1	1	1	1	1	5
63	Anti Virus (Software)	-	-	-	1	1	1	1	1	5
64	Operation System Windows (Software)	-	-	-	1	1	1	1	1	5
65	Microsoft Office (Software)	-	-	-	1	1	1	1	1	5
66	Hard Disk External	-	-	-	-	7	5	1	5	18
67	Televisi	2	-	-	2	1	1	-	-	4
68	Camera Handycam	2	-	-	1	-	2	1		4
69	Lensa	1	-	-	-	-	2	-	-	2
70	Drone DJI Phantom	-	-	1	-	1	-	-	-	1
71	Tripod	3	-	-	-	-	4	-	-	4
72	Clip on Wireless	4	-	-	-	-	1	-	-	1
73	Video Sender	1	-	-	-	-	1	-	-	1
74	Lampu Aputure	1	-	-	-	-	2	-	-	2
75	Camera Canon 70D	1	-	-	-	-	1	-	-	1
76	Camera DSLR	3	-	-	-	-	2	-	-	1
77	Drone Mavic Pro	1	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Imac	3	-	-	-	1	-	-	-	1
79	Vmix Live	1	-	-	-	-	1	-	-	-
80	Camcorder	3	-	-	-	-	-	-	-	-
81	High chair	2	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Karpet	1	-	-	2		1		1	4
83	Audio Mixer	1	-	-	1		1			3
84	Proyektor	1	-	-	1	1	1	1	1	5
85	Multi Interaktif Sistem	1	-	-	1					1
86	Memory card camera	-	-	-	-	2	1		1	4
87	Laptop video graphic editing	-	-	-	-	4				4
88	Camera live streaming	-	-	-	-	1		1		2
89	Gimbal	-	-	-	-	1	-	1	-	2
90	Sound mixer	-	-	-	-	1	-	1	-	2
91	Microphone	-	-	-	-	3	-	1	-	4
92	Lemari kamera	-	-	-	-	1	-		-	1

Sumber: Diskominfo Kota Bogor Tahun 2023

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.3.1. Tingkat Capaian Kinerja Periode Sebelumnya

Tingkat capaian kinerja Diskominfo berdasarkan sasaran/target Renstra Diskominfo periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.9 dan 2.10, adapun realisasi

pendanaan pelayanan Diskominfo Kota Bogor selengkapnya pada Tabel 2.11 sebagai berikut:

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2019-2021

Tujuan / Sasaran	*Indikator Kinerja*	*Satuan*	*Target*				*Realisasi*			*Capaian (%)*		
			2019	*2020*	*2021*	*Kondisi Akhir 2024*	*2019*	*2020*	*2021*	*2019*	*2020*	*2021*
Tujuan 1: Peningkatan kualitas smart government												
Sasaran 1: Penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka penerapan konsep Good Governance	*Nilai Indeks Evaluasi SPBE*	*Indeks*	*NA*	*2,92*	*2,92*	*2,94*	*NA*	*2,97*	*3,11*	*NA*	*101,71*	*106,51*
	Peningkatan layanan pengaduan masyarakat	*%*	*NA*	*85*	*90*	*100*	*NA*	*78*	*76*	*NA*	*91,76*	*84,44*
Sasaran 2: Tersedianya data statistik sektoral	*Jumlah penyajian statistik sektoral*	*buku*	*NA*	*2*	*2*	*2*	*NA*	*1*	*2*	*NA*	*50*	*100*
Tujuan 2: Peningkatan Manajemen Tata Kelola Organisasi yang Akuntabel dan Profesional												
Sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas	*Nilai Akuntabilitas kinerja Dinas*	*Nilai*	*B*	*BB*	*BB*	*A*	*BB*	*BB*	*A*	*07,25*	*113,86*	*114,83*
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	*%*	*100*	*90*	*90*	*100*	*100*	*90*	*90*	*100*	*100*	*100*

Sumber: Diskominfo Kota Bogor Tahun 2023

Tabel 2.10
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2022-2023

No	**URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH**	**SATUAN**	**Target**			**Capaian**		**Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD**	**Persentase Capaian**	
			2022	**2023**	**2024**	**2022**	**2023**		**2022**	**2023**
	INDIKATOR SASARAN (INDIKATOR KINERJA UTAMA)									
1	Persentase penyediaan data Statistik Sektoral	%	79	84	84	86	88	85	108,86	104,76
2	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Level	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	100,00	100,00
3	Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkungan Perangkat Daerah	nilai	80,01	81	82	71,02	87,42	82	88,76	107,93
4	Nilai Indeks Evaluasi SPBE	Index	2,98	2,98	2,99	2,75	3,72	2,99	92,28	124,83
5	IKM layanan pengaduan masyarakat	%	82	85	85	84,92	85,41	85	103,56	100,48

Sumber: Diskominfo Kota Bogor Tahun 2021

Berdasarkan tabel 2.9 dan 2.10, terlihat bahwa hasil pencapaian kinerja pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika rasio capaiannya hampir semua 100%, dihitung dari perbandingan antara target renstra dan realisasi capaian.

Pada indikator kinerja penyediaan data Statistik Sektoral, capaiannya sudah melebihi target dengan persentase capaian di atas 100%. Hal tersebut menunjukkan komitmen Diskominfo sebagai walidata Kota Bogor yang berfungsi mengumpulkan dan menyebarkan data sektoral kepada publik untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, tidak hanya digunakan oleh pemerintah kota sebagai dasar tujuan pembangunan ke depannya.

Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi/ memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan) kerangka kerja keamanan informasi kepada pimpinan Instansi. Pada tahun 2023 Diskominfo Kota Bogor melakukan penilaian mandiri terhadap Indeks KAMI dengan hasil evaluasi akhir Cukup Baik, dan Skor Tingkat Kelengkapan 523. Saat ini Indeks KAMI Diskominfo Kota Bogor memiliki Tingkat Kelengkapan di Level II sehingga capaiannya 100%.

Dalam hal penyelenggaraan sistem dan manajemen keamanan informasi, implementasi baik dari sistem pemerintahan berbasis elektronik serta layanan pengaduan masyarakat di tahun 2023 capaiannya sudah melebihi 100%, telah jauh lebih kompleks dan komprehensif yang bukan saja menangani pengaduan, tetapi juga mampu memberikan layanan informasi dan layanan lain dalam koridor penyelenggaraan kepemerintahan dan pembangunan di Kota Bogor.

Pada indikator nilai Reformasi Birokrasi di lingkungan perangkat daerah, hasil penilaiannya 87,42 dari target 81 sehingga capaiannya sebesar 107,93%. Hal tersebut meningkat cukup tajam dari capaian Diskominfo tahun 2022 sebesar 88,76%. Di tahun 2023 mampu merealisasikan rencana target

nilai reformasi birokrasi yang ditetapkan, mengingat dibalik kesuksesan dari seluruh indikator kinerja utama di atas yang telah melampaui target.

Kinerja sebelum tahun 2023 terdapat ketidaktercapaian target disebabkan karena dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan selalu adanya hambatan dan kendala. Di bawah ini beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor dalam mencapai target indikator sasaran antara lain:

1. Perencanaan yang disusun telah sistematis dan terkoordinir dengan baik, namun perubahan kondisi lingkungan strategis yang sangat dinamis dan tidak dapat dikendalikan sangat memengaruhi kemampuan Dinas dalam merealisasikan targetnya;
2. Prasarana dan sarana yang kurang memadai;
3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia aparatur;
4. Terbatasnya anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan;
5. Pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan belum dilakukan dengan baik.

Permasalahan timbul akibat tidak sesuainya rencana yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya, sehingga diperlukan upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi. Upaya pemecahan terhadap hambatan dan kendala tersebut antara lain:

1. Pemenuhan terhadap prasarana dan sarana penunjang;
2. Peningkatan kualitas aparatur misalnya antara lain melalui diklat, pelatihan, tugas belajar;
3. Dalam penganggaran untuk setiap kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan perencanaan;
4. Adanya pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan belum dilakukan dengan baik.

Tabel 2.11
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor

No	Uraian	Anggaran pada tahun ke-						Realisasi Anggaran pada tahun ke-						Rasio antara realisasi dan Anggaran pada tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan Anggaran	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	885.502.579	743.412.740					864.661.028	737.078.635					97,64	99,14					-16,05%	-14,76%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	409.303.000	1.999.181.125					404.247.999	1.856.210.378					98,76	92,84					388,44%	359,18%
3	Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	14.000.000						14.000.000						100						-	-
4	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	8.540.205.010	11.709.740.600					8.436.086.732	11.417.699.139					98,78	97,51					37,11%	35,34%
5	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	21.229.000						21.229.000						100						-	-
6	Program Pengembangan Data dan Informasi		2.560.000						2.560.000						100					-	-
7	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan		3.200.000						3.200.000						100					-	-
8	Program penunjang urusan pemerintah			12.955.444.506	13.688.676.268	12.941.030.411	14.683.501.704			12.311.702.250	13.323.647.318	12.434.148.946	-			95,03	97,33	96,08	-	4,55%	0,77%

No	Uraian	Anggaran pada tahun ke-						Realisasi Anggaran pada tahun ke-						Rasio antara realisasi dan Anggaran pada tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan Anggaran	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
	daerah kabupaten / kota																				
9	Program Informasi dan Komunikasi Publik	[redacted]	[redacted]	5.441.787.100	4.773.983.100	4.891.133.283	1.635.454.289	[redacted]	[redacted]	5.424.116.222	4.769.220.000	4.881.104.944	-	[redacted]	[redacted]	99,68	99,90	99,79	-	-25,46%	-4,86%
10	Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika	[redacted]	[redacted]	6.830.724.870	6.663.641.210	4.348.712.434	2.863.088.702	[redacted]	[redacted]	6.580.567.670	6.639.478.662	4.344.441.379	-	[redacted]	[redacted]	96,34	99,64	99,90	-	-23,78%	-16,84%
11	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	[redacted]	273.529.000	240.233.200	162.624.000	137.571.400	322.998.800	[redacted]	272.446.500	236.703.431	159.424.400	136.788.998	-	[redacted]	99,60	98,53	98,03	99,43	-	18,73%	-19,99%
12	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	[redacted]	89.065.000	165.217.000	125.196.500	94.100.000	105.655.100	[redacted]	88.782.000	164.633.925	124.996.900	93.981.600	-	[redacted]	99,68	99,65	99,84	99,87	-	12,18%	12,18%

Sumber: Diskominfo Kota Bogor Tahun 2023

Untuk rasio anggaran dan realisasi sebagaimana tercantum pada Tabel 2.11, pada tahun 2019 sampai tahun 2023 dapat dikatakan baik karena seluruhnya hampir mencapai rasio di atas 95%. Hanya satu pada tahun 2020 untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, rasio anggaran dan realisasi terendah dengan nilai di bawah 95% yaitu sebesar 92,84%, hal ini dikarenakan program pelaksanaan dari kegiatan tersebut belum maksimal sehingga perlu evaluasi lebih lanjut.

Tingkat capaian kinerja Diskominfo berdasarkan sasaran/target Renstra Diskominfo pada tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel 2.12, tabel 2.13, tabel 2.14, tabel 2.15 dan tabel 2.16 sebagai berikut:

Tabel 2.12
Pencapaian Kinerja dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019

NO	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Kinerja			Pendanaan		
				Target Renstra	Realisasi Capaian	%	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Diskominfostandi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90%	90%	100%	885.502.579	864.661.028	98%
		Pengelolaan Rumah Tangga OPD	Pemenuhan kebutuhan operasional Dinas	100%	100%	100%	885.502.579	864.661.028	98%
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90%	90%	100%	409.303.000	404.247.999	99%
		Pengadaan Inventaris Kantor	Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	335.950.000	333.754.848	99%
		Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	100%	100%	100%	73.353.000	70.493.151	96%
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	75,10	89%	14.000.000	14.000.000	100%
		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD	Terselesaikannya Dokumen Perencanaan dan pelaporan kinerja tepat waktu	100%	100%	100%	14.000.000	14.000.000	100%
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Prosentase pelayanan publik yang berbasis sistem informas	60%	50%	83%	8.540.205.010	8.436.086.732	99%
		Pengadaan BANDWITH.	Tersedianya Bandwidth internet OPD Se-Kota Bogor	400 Mbps	400 Mbps	100%	2.500.000.000	2.499.990.000	100%
		Pemeliharaan jaringan intranet dan internet (BACKBONE) Kota Bogor	Terpeliharanya jaringan intranet dan internet (backbone)	145 titik	145 titik	100%	669.936.800	666.657.800	100%
			Tertatanya jaringan intranet LAN pada SKPD se-Kota Bogor	145 titik	145 titik	100%			
		Pengembangan Infrastruktur Jaringan Kota	Tersedianya jaringan Fiber Optik di Perangkat Daerah	5 titik FO	5 titik FO	100%	772.327.400	766.861.650	99%
		Pemeliharaan Wifi Ruang Publik	Tersediannya wifi di ruang public	45 titik	45 titik	100%	74.349.750	73.640.000	99%
		Pemeliharaan Grounding Listrik dan Erester OPD dan Kelurahan	Terpeliharanya grounding listrik dan erester OPD dan kelurahan	4 titik	4 titik	100%	74.425.000	73.662.000	99%

NO	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Kinerja			Pendanaan		
				Target Renstra	Realisasi Capaian	%	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
		Pengembangan dan Pengelolaan eGovernment	Jumlah aplikasi yang dibuat dan dikelola	3 aplikasi	3 aplikasi	100%	795.250.000	775.790.000	98%
			Tersedianya Tenaga Outsourching Programmer	3 Orang	3 Orang	100%			
			Tersedianya Tenaga Outsourching Surveyor	3 Orang	3 Orang	100%			
			Tersedianya Tenaga Oursourching Designer grafis	3 Orang	3 Orang	100%			
			Tersedianya webmail Kota Bogor	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%			
			Tersedianya Colocationt Cloud	1 Paket	1 Paket	100%			
		Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bogor	Tersedianya Keberlangsungan website dan Kota Bogor	1 aplikasi	1 aplikasi	100%	48.493.000	48.493.000	100%
			Terlaksananya Pengelolaan website Pemkot Bogor	5.322.488 Kunjungan	5.322.488 Kunjungan	100%			
		Pengembangan dan Pengelolaan Bogor Green Room	Terpeliharanya Perangkat Multimedia Bogor Green Room	1paket	1paket	100%	297.144.000	294.370.000	99%
			Tersedianya Outsourcing Operator Bogor Green Room	4 Orang	4 Orang	100%			
		Digitalisasi Profil	Terpeliharanya Mesin Anjungan Informasi	1 paket	-	-	29.551.350	29.030.000	98%
			Tersedianya Pengembangan Aplikasi Mesin Anjungan	1 paket	1 paket	100%			
		Penyelenggaraan Streaming Radio Sipatahunan	Terpenuhinya/Tercapainya Kebutuhan Informasi Bagi Publik Melalui Media Streaming Radio Sipatahunan	70%	-	-	95.717.000	95.711.000	100%
			Terselenggaranya Streaming Radio Sipatahunan	5760 Jam	5760 Jam	100%			
			Operasional Streaming Radio Sipatahunan	12 Bulan	12 Bulan	100%			
			Tersedianya dan Terpeliharanya Alat-Alat Studio Radio Sipatahunan	1 Paket	1 Paket	100%			
			Peliputan/Penyiaran dan Operatoring Radio Sipatahunan	80 Kali	80 Kali	100%			
		Penyelenggaraan siaran Televisi dan Streaming TV Sipatahunan	Terpenuhinya/Tercapainya Kebutuhan Informasi Bagi Publik Melalui Media Streaming Televisi Sipatahunan	70%	-	-	153.617.000	152.018.000	99%

NO	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Kinerja			Pendanaan		
				Target Renstra	Realisasi Capaian	%	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
			Terselenggaranya Streaming Televisi Sipatahunan	5760 Jam	5760 Jam	100%			
			Operasional Streaming Televisi Sipatahunan	12 Bulan	12 Bulan	100%			
			Peliputan/Penyiaran/Operatoring/Editing Siaran TV dan Streaming TV Sipatahunan	80 Kali	80 Kali	100%			
			Tersedianya dan Terpeliharanya Alat-Alat Studio Televisi Sipatahunan	2 Paket	2 Paket	100%			
			Pembuatan Konten	1 Paket	1 Paket	100%			
			Peliputan/Kameramen/Editing	36 Kali	36 Kali	100%			
		Promosi dan Sosialisasi Layanan Publik berbasis elektronik	Meningkatnya layanan Organisasi Perangkat Daerah berbasis Elektronik	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	100%	11.660.000	10.710.000	92%
		Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerja sama Smartcity	Terciptanya Ekosistem TIK untuk menunjang Smart City Kota Bogor	2 kegiatan	2 Kegiatan	100%	38.600.000	22.350.000	58%
		Pengadaan Infrastruktur Data Center	Tersedianya perangkat Pusat Data	2 paket	2 paket	100%	295.782.000	291.270.000	98%
		Pemeliharaan dan pengelolaan Infrastruktur Data Center	Terlaksananya pemeliharaan dan pengelolaan Pusat Data	3 paket	3 paket	100%	381.170.450	378.094.000	99%
		Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Kota (SIMATA)	Tersedianya Pengembangan Aplikasi SIMATA	1 paket	1 paket	100%	50.540.000	50.240.000	99%
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Teleconference Pemerintah	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Teleconference Pemerintah	2 paket	2 paket	100%	69.995.000	68.690.000	98%
		Pengelolaan Contact Center Pengaduan Masyarakat	Terkelolanya Layanan Contact Center pengaduan Masyarakat	80%	100%	125%	1.322.800.000	1.298.654.982	98%
		Pengelolaan dan Pelayanan Komunikasi Publik	Tersedianya Booklet smartcity sebagai media penyebarluasan informasi	1 paket	1 paket	100%	47.200.000	45.550.000	97%
		Pengembangan Aplikasi Data Base Komunikasi	Tersedianya Aplikasi Database Komunikasi yang Update dan Optimal	1 aplikasi	1 aplikasi	100%	35.450.000	34.995.000	99%
		Pengembangan dan Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian	Tersedianya sistem keamanan informasi	3 paket	-	-	136.608.000	134.538.000	98%
			Terpeliharanya sistem informasi	30%	30%	100%			
			Terkelolanya komunikasi persandian	100%	100%	100%			

NO	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Kinerja			Pendanaan		
				Target Renstra	Realisasi Capaian	%	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
			Tersedianya alat keamanan informasi	1 Paket	1 Paket	100%			
			Tersedianya sistem keamanan informasi	2 Paket	2 Paket	100%			
			Tersedianya Anti Virus	1 Paket	1 Paket	100%			
		Penyusunan Regulasi TIK (Perwali dan SOP)	Tersusunnya Regulasi TIK	3 Dokumen	-	-	1.429.550	-	0%
		Pemeliharaan dan Pengembangan CCTV dan Multimedia Kota Bogor	Terpelihara dan Tersedianya CCTV di lingkungan Balaikota dan Kawasan Publik	13 titik	13 titik	100%	353.273.510	347.275.000	98%
		Penyelenggaraan Diseminasi dan Kemitraan Media Publik	Terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 68 Kelurahan, 6 Kecamatan dan 1 Tingkat Kota	75 kelompok	48 Kelompok	64%	63.417.000	63.062.600	99%
		Pembangunan Wifi ruang publik	Tersedianya ruang publik yang memiliki wifi	5 titik	5 titik	100%	59.262.000	58.900.000	99%
		Pengadaan Modul Aplikasi Pengaduan Masyarakat	Tersedianya Modul Aplikasi Pengaduan Masyarakat	1 paket	1 paket	100%	88.200.000	85.527.500	97%
		Penilaian Index E-Government Indonesia	Nilai Index e-Government Indonesia & Nilai SPBE	3.13 index	3,10 Index	99%	33.588.200	29.838.200	89%
		Pengembangan dan Pembuatan Datawarehouse	Tersedianya Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Datawarehouse	1 paket	1 paket	100%	36.040.000	35.790.000	99%
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Terselenggaranya Forum Data Statistik Sektoral	5 kali	5 kali	100%	4.378.000	4.378.000	100%
		Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Ketersediaan SDM yang mempunyai kompetensi di bidang TIK (orang/OPD)	2	2	100%	21.229.000	21.229.000	100%
		Penyelenggaraan Pelatihan bagi SDM TIK seluruh OPD	Terlatihnya TIK bagi para SDM di setiap OPD	50 orang	50 orang	100%	8.829.000	8.829.000	100%
		Pelatihan Aplikasi Pengaduan Masyarakat	Terlatihnya Peserta Pelatihan Aplikasi Pengaduan Masyarakat	100 orang	100 orang	100%	12.400.000	12.400.000	100%
			JUMLAH				**9.870.239.589**	**9.740.224.759**	**99%**

Sumber: Perubahan Renstra Diskominfo Kota Bogor Tahun 2019-2024

Tabel 2.13
Pencapaian Kinerja dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Kinerja			Pendanaan		
			Target Renstra	Realisasi Capaian	%	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika								
I	Program: Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Hasil Penilaian SPBE	2.92 indeks	2,97 Indeks	102%	7.947.168.000	7.793.249.600	98%
		Persentase data urusan pemerintah daerah Kota Bogor yang terintegrasi	14%	14%	100%	2.284.015.000	2.204.192.200	97%
		Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD sesuai SOP	85%	78%	92%	808.460.000	756.392.239	94%
		Persentase Keterbukaan Informasi publik	100%	98%	98%	670.097.600	663.865.100	99%
1	Pendataan, Verifikasi dan Serah Terima Hak Akses Seluruh Aplikasi dan Data Base serta Evaluasi SPBE	Nilai Indeks Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,92 Indeks	2,97 Indeks	102%	-	-	-
		Hak Akses terhadap 103 Aplikasi dan akan terus bertambah setiap tahunnya	2 Hak akses	-	-			
2	Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bogor	Tersedianya keberlangsungan pengelolaan website Kota Bogor (colocation)	12 Bulan	12 Bulan	100%	49.730.000	49.123.000	99%
		Tersedianya outsourching pengelolaan website Kota Bogor	1 Orang	1 Orang	100%			
		Terpeliharanya keberlangsungan server domain Kota Bogor	1 Paket	-	-			
3	Penyusunan Regulasi Penyelenggaraan Sistem Elektronik	Peraturan Wali Kota dalam paket peraturan pelaksanaan SPBE	2 Perwali	1 Perwali	100%	3.650.000	3.650.000	100%
4	Relokasi dan revitalisasi ruang kendali jaringan dan server	Tersedianya ruang kendali jaringan dan server	1 Paket	-	-	-	-	-
5	Pengadaan Infrastruktur ruang kendali jaringan dan server	Tersedianya perangkat ruang kendali jaringan dan server	3 Paket	1 Paket	33%	460.000.000	350.269.000	76%
		Tersedianya perangkat ruang kendali jaringan dan server	1 Paket	1 Paket	100%			
6	Pemeliharaan dan Pengelolaan Infrastruktur ruang kendali jaringan dan server	Terpeliharanya Perangkat ruang kendali jaringan dan server	1 Paket	-	-	211.117.000	210.836.000	100%
		Tersedianya outsourching ruang kendali jaringan dan server	1 Paket	1 Paket	100%			
		Tertata dan terkelolanya ruang kendali jaringan dan server	1 Paket	-	-			

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Kinerja			Pendanaan		
			Target Renstra	Realisasi Capaian	%	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
		Tersedianya DED Ruang Kendali Jaringan dan Server	1 Paket	1 Paket	100%			
7	Pengelolaan Data Recovery Center (DRC)	Tersedianya DRC	1 Paket	1 Paket	100%	156.937.000	148.972.000	95%
		Terpeliharanya perangkat data recovery center (DRC)	1 Paket	1 Paket	100%			
		Tersedianya perangkat server	1 Paket	-	-			
8	Pengembangan Infrastruktur Jaringan Kota	Tersedianya jaringan FO di Perangkat Daerah	10 titik	9 Titik	90%	1.443.200.000	1.433.682.700	99%
9	Pembangunan Wifi Ruang Publik	Tersedianya ruang publik yang memiliki wifi	10 titik	5 titik	50%	75.000.000	73.997.500	99%
10	Pemeliharaan Jaringan intranet dan internet (backbone) Kota Bogor	Terpeliharanya jaringan intranet dan internet (backbone) dan tertatanya jaringan intranet LAN pada Perangkat Daerah se - Kota Bogor	146 titik	146 titik	100%	935.710.000	930.973.500	99%
11	Pemeliharaan Wifi Ruang Publik	Terpeliharanya wifi ruang publik	50 titik	50 titik	100%	49.968.000	48.743.000	98%
12	Pemeliharaan Grounding listrik dan erester	Terpeliharanya Grounding listrik dan erester Perangkat Daerah dan Kelurahan	8 titik	4 titik	50%	49.968.000	48.776.000	98%
13	Pengelolaan Bandwith	Tersedianya bandwith internet se - Kota Bogor	1000 Mbps	650 Mbps	65%	3.029.710.000	3.029.030.000	100%
14	Pengadaan CCTV Kota Bogor	Jumlah titik CCTV	15 titik	4 titik	27%	350.000.000	348.285.200	100%
15	Pemeliharaan CCTV Kota Bogor	Jumlah titik CCTV	58 titik	58 titik	100%	157.210.000	156.569.700	100%
		Tersedianya Outsourching Operator CCTV	1 orang	1 orang	100%			
16	Pemeliharaan Teleconference Kota Bogor	Terpeliharanya perangkat teleconference	1 Paket	1 Paket	100%	74.968.000	74.818.000	100%
		Tersedianya perangkat teleconference	1 Paket	-	-			
		Tersedianya lisensi ID Teleconference	1 Paket	-	-			
17	Pengembangan dan pengelolaan Bogor Green Room dan Command Center, Server Data dan Aplikasi	Terpeliharanya Perangkat multimedia Bogor Green Room/Command Center	1 Paket	1 Paket	100%	1.537.100.000	1.480.596.200	96%
		Tersedianya Outsourcing Operator Bogor Green Room	1 Paket	1 Paket	100%			
		Terbangunnya dan Meningkatnya Fasilitas Command Center	2 lokasi	2 lokasi	100%			
		Tersedianya PC dan Speaker aktif penunjang VideoWall	1 Paket	1 Paket	100%			

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Kinerja			Pendanaan		
			Target Renstra	Realisasi Capaian	%	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
18	Pemindahan dan penataan ulang infrastruktur Command Center (Bogor Green Room) (APBD Provinsi)	Tersedianya command center yang memenuhi standar minimal sebagai Command Center, Monitoring center, dan Crisis Center	4 Paket	-	-	-	-	-
19	Digitalisasi Profil dan Pengembangan/ promosi ekosistem e-government dan smart city	Tersedianya reklame untuk promosi smart city	1 paket	-	-	-	-	-
		Tersedianya master plan smart city	1 Dokumen	-	-			
		Tersedianya master plan e-government	1 Dokumen	-	-			
		Tersedianya anjungan promosi	7 Set	-	-			
20	Pengembangan datawarehouse dan sistem informasi kota (SIMATA)	Tersedianya Paket Pengembangan Datawarehouse	1 paket	-	-	-	-	-
21	Sosialisasi/Diseminasi Standarisasi Aplikasi	Sosialisasi/Diseminasi yang dilaksanakan per tahun	2 pertemuan	1 pertemuan	50%	17.075.000	17.075.000	100%
22	Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi	Aplikasi Layanan e-Government yang dibuatkan/ dikembangkan/ dipelihara oleh Diskominfo	3 Aplikasi	3 Aplikasi	100%	729.840.000	706.521.000	97%
		Tersedianya Outsourching Programer pembangunan dan pengembangan aplikasi	1 Paket	1 Paket	100%			
		Tersedianya Outsourching desainer pembangunan dan pengembangan aplikasi	1 Paket	1 Paket	100%			
		Tersedianya Outsourching surveyor pembangunan dan pengembangan aplikasi	1 Paket	1 Paket	100%			
		Terpeliharanya perangkat pembangunan dan pengembangan aplikasi	1 Paket	1 Paket	100%			
		Tersedianya lisensi hak pakai Cpanel	1 Paket	-	-			
		Tersedianya lisensi hak pakai webmail Kota Bogor	1 Paket	-	-			
23	Layanan Kemitraan dan Pengelolaan Media Dalam Penyebaran Informasi	Tersedianya Konten Publikasi Informasi	10 Konten	-	-	97.417.600	97.417.600	100%
		Terbinanya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang kreatif dan Inovatif	75 kelompok	-	-			
		Terselenggaranya Lomba Kreatif Kelompok Informasi Masyarakat	1 Lomba	-	-			
		Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Penyebaran Informasi	11 Orang	11 Orang	100%			

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Kinerja			Pendanaan		
			Target Renstra	Realisasi Capaian	%	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
		Tersebarnya Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah	4 Medsos (Internal & External)	4 Medsos (Internal & External)	100%			
		Tersedianya Peralatan studio Video dan Film	1 paket	-	-			
		Penyebaran Informasi Kebijakan Pemerintah Melalui Media Spanduk	120 Buah	-	-			
24	Pengelolaan dan Pelayanan Komunikasi Publik Berbasis Multimedia	Tersedianya Booklet Smartcity	1 paket	1 paket	100%	172.680.000	167.065.000	97%
		Terpeliharanya hologram	1 paket	-	-			
		Tersedianya Brosur/Leaflet	1 paket	1 paket	100%			
		Tersedianya APK Mobily Smartcity	1 paket	-	-			
		Terkelolanya website dan media sosial	1 paket	1 paket	100%			
		Lomba Karya Jurnalis	1 Kali	1 Kali	100%			
25	Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat	Tersedianya Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat	1 paket	1 paket	100%	808.460.000	756.392.239	94%
		Tersedianya Operator pengelola Layanan Pengaduan Masyarakat	14 Org	14 Org	100%			
		Tersedianya data survey Indeks Kepuasan Masyarakat layanan pengaduan Masyarakat	1 paket	-	-			
		Tersedianya server Aplikasi layanan Pengaduan masyarakat	1 Unit	-	-			
		Terselenggaranya Sosialisasi Aplikasi layanan Pengaduan Masyarakat	1 paket	-	-			
		Terlaksananya Pemeliharaan Aplikasi Sibadra	1 paket	1 paket	100%			
26	PembuatanaplikasiMobile Bogor Destinasi (DID)	Tersedianya aplikasi mobile bogor destinasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%	100.000.000	99.382.500	99%
27	Pengadaan Sarana IT Pendukung Recovery Pariwisata (Hibah Pariwisata)	Tersedianya Server	1 Paket	1 Paket	100%	900.000.000	885.524.000	98%
		Tersedianya Router	1 Paket	1 Paket	100%			
		Tersedianya Wifi Publik di Kawasan Pariwisata	4 lokasi	4 lokasi	100%			
28		Terkelolanya penerbitan Advertorial di media massa	2 Bulan	2 Bulan	100%	300.000.000	300.000.000	100%

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Kinerja			Pendanaan		
			Target Renstra	Realisasi Capaian	%	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
	Pengelolaan danPelayanan Komunikasi Publik Tentang Pariwisata Kota Bogor (Hibah Pariwisata)	Terselenggaranyan sosialisasi program pemkot Bogorterkait pariwisata Kota Bogor di Media Massa	2 Bulan	2 Bulan	100%			
		Tersampaikannya informasi tentang kebijakanpemulihan pariwisata kota bogor melalui jumpa pers	2 Bulan	2 Bulan	100%			
II	Program: Pengembangan Data dan Informasi	Prosentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik	55%	85%	155%	2.560.000	2.560.000	100%
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan PPID	Kuisioner dan Pelaksanaan Wawancara PPID Pembantu	40Lembaga	-	-	-	-	-
		Laporan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	1 Dokumen	-	-			
		Workshop KIP	1 Kali	-	-			
2	Penguatan Hubungan Kelembagaan Masyarakat	Kegiatan Bakohumas TK. Kota Bogor	1 Kali	-	-	2.560.000	2.560.000	100%
		Forum Perhumas	1 Kali	-	-			
		Keikutsertaan dalam Bakohumas TK. Provinsi dan TK. Nasional	2 Kali	-	-			
III	Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100%	100%	100%	743.412.740	737.078.635	99%
1	Pengelolaan Rumah Tangga PD	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100%	100%	100%	743.412.740	737.078.635	99%
IV	Program: Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	80%	80%	100%	1.999.181.125	1.856.210.378	93%
1	Pengadaan Inventaris Kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	80%	80%	100%	1.702.764.125	1.563.424.250	92%
2	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	80%	80%	100%	296.417.000	292.786.128	99%
V	Program: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	B Point	BB Point	-	3.200.000	3.200.000	100%
1	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD	Dokumen Perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	3.200.000	3.200.000	100%
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik								
VI	Program: Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	70%	70%	100%	273.529.000	272.446.500	100%

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Kinerja			Pendanaan		
			Target Renstra	Realisasi Capaian	%	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Pengelolaan Statistik Sektoral	Tersedianya indikator statistik sektoral	7 Indikator	-	-	127.607.000	127.607.000	100%
		Tersusunnya Data Indeks Ketahanan Keluarga	1 Paket	1 Paket	100%			
2	Satu Data Statistik Sektoral	Terselenggaranya satu Data Statistik Sektoral	1 data statistik sektoral	-	-	68.179.000	67.996.500	100%
		Terpeliharanya Aplikasi Portal Data	1 Paket	1 Paket	100%			
3	Penyajian Statistik Sektoral	Tersedianya hasil produk Data Statistik Sektoral yang dipublikasikan	2 media	1 Paket	50%	77.743.000	76.843.000	99%
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Persandian								
VII	Program: Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Level 1	Level 1	100%	89.065.000	88.782.000	100%
1	Pengembangan dan Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian	Tersedianya Dokumen Sistem Keamanan Informasi	1 Paket	-	-	89.065.000	88.782.000	100%
		Tersedianya Sistem Anti Virus	1 Paket	-	-			
		Tersosialisasinya Keamanan Informasi	164 Orang	-	-			
		Tersedianya Firewall	1 Paket	1 Paket	100%			
		Tersedianya Software berlisensi	1 Paket	-	-			
		Tersedianya SSL	1 Paket	1 Paket	100%			
		Tersedianya Aplikasi Tanda Tangan Elektronik Pada E surat Diskominfo	1 Paket	1 Paket	100%			
2	Audit Sistem Informasi dan Evaluasi Status Aplikasi di Tingkat Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Audit Sistem Elektronik per tahun dengan pertimbangan bahwa setiap tahunnya akan ada penambahan dan pengembangan aplikasi	1 Paket	-	-	-	-	-
		JUMLAH				**14.820.688.465**	**14.377.976.652**	**97%**

Sumber: Perubahan Renstra Diskominfo Kota Bogor Tahun 2019-2024

Tabel 2.14
Pencapaian Kinerja dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Kinerja			Pendanaan		
			Target Renstra	Realisasi Capaian	%	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika								
I	Program: Aplikasi Informatika	Nilai aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,71 Indeks	3,10 Indeks	114%	65.930.000	60.109.800	91%
		Nilai aspek Perencanaan Strategis SPBE	3,0 Indeks	2,50 Indeks	83%	24.255.000	22.170.000	91%
		Nilai aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,33 Indeks	3,25 Indeks	139%	6.162.728.470	5.926.870.120	96%
		Nilai aspek Penerapan Manajemen SPBE	2,7 Indeks	2,63 Indeks	97%	577.811.400	571.417.750	99%
1	Kegiatan: Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Domain, Sub Domain, dan IP Address milik Pemerintah Kota Bogor	100%	100%	100%	49.730.000	49.365.800	99%
		Persentase Perangkat Daerah yang terhubung Fiber Optik milik Pemerintah Kota Bogor	100%	94%	94%	4.718.081.200	4.707.315.720	100%
		Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	level 3	level 4	-			
		Tingkat Kematangan Audit Infrastruktur	level 3	level 4	-			
	Sub Kegiatan: Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan: Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota/Kabupaten	Persentase Domain dan Subdomain yang terkelola	100%	-	-	49.730.000	49.365.800	99%
		Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan IP address versi 6 (Ipv6)	1Perangkat Daerah	-	-			
		Tersedianya Colocation Server Domain dan Sub Domain Kota Bogor	1 Tahun	1 Tahun	100%			
	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Titik Jaringan Fiber Optik di Perangkat Daerah	10 titik	4 titik	40%	4.718.081.200	4.707.315.720	100%
		Jumlah Titik Wifi Publik	5 titik	-	-			
		Jumlah Titik Jaringan Intranet dan Internet pada Perangkat Daerah se Kota Bogor yang dipelihara	146 titik	146 titik	100%			
		Jumlah Wifi Publik yang dipelihara	5 titik	-	-			

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Kinerja			Pendanaan		%
			Target Renstra	Realisasi Capaian	%	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	
		Jumlah grounding listrik dan erester yang dipelihara	7 titik	7 titik	100%			
		Jumlah Kapasitas Bandwidth Internet di Kota Bogor	1100 Mbps	1100 Mbps	100%			
		Tersedianya perangkat LAN	2 Paket	2 Paket	100%			
		Tersedianya Perangkat FO	2 Paket	2 Paket	100%			
		Tersedianya Perangkat Wireless	2 Paket	2 Paket	100%			
		Terlaksananya perencanaan teknis jaringan FO	1 Paket	1 Paket	100%			
		Terlaksananya pengawasan teknis jaringan FO	1 Paket	1 Paket	100%			
2	Kegiatan: Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Arsitektur SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	level 3	Level 5	-	-	-	-
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	level 3	Level 5	-			
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Manajemen Data	level 3	Level 5	-			
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Pembangunan Aplikasi SPBE	level 3	Level 5	-			
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Layanan Pusat Data	level 3	Level 5	-			
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	level 3	Level 4	-			
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	level 3	Level 5	-			
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Manajemen Keamanan Informasi	level 3	Level 4	-			
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Audit TIK	level 3	Level 4	-			

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Kinerja			Pendanaan		%
			Target Renstra	Realisasi Capaian	%	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	level 3	Level 5	-	24.255.000	22.170.000	91%
		Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	level 3	Level 4	-	65.930.000	60.109.800	91%
		Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	level 3	Level 4	-			
		Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	level 3	Level 5	-			
		Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	level 3	Level 4	-			
		Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	level 3	Level 4	-			
		Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	level 3	level 3	-	314.557.600	314.037.300	100%
		Tingkat kematangan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya TI dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun	100%	515.592.300	511.687.750	99%
		Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	level 3	Level 4	-	190.702.500	190.635.200	100%
		Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	level 3	Level 5	-	850.182.260	626.072.400	74%
		Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	level 2	Level 3	-	39.474.910	39.443.700	100%
		Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	level 3	Level 4	-	62.219.100	59.730.000	96%
		Tingkat Kematangan Audit Aplikasi SPBE	level 3	Level 4	-	-	-	-
	Sub Kegiatan: Penatalaksanaan dan pengawasan e-Government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah regulasi eGovernment yang terbit	2 Dokumen	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan: Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah peserta Sosialisasi/Diseminasi yang dilaksanakan per tahun	3 Pertemuan	3 Pertemuan	100%	65.930.000	60.109.800	91%
		Tersedianya Sertifikasi ISO	-	-	-			

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Kinerja			Pendanaan		%
			Target Renstra	Realisasi Capaian	%	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	
	Sub Kegiatan: Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terkelolanya DRC	1 Paket	-	-	314.557.600	314.037.300	100%
		Terkelolanya Perangkat Pusat Data	7 Paket	-	-			
		Terkelolanya Perangkat Pusat Data	1 Paket	1 Paket	100%			
		Tersedianya Data Recovery Center	1 Paket	1 Paket	100%			
		Tersedianya Router	1 Paket	1 Paket	100%			
	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Terpeliharanya perangkat teleconference	1 Paket	1 Paket	100%	74.968.000	74.924.000	100%
		Tersedianya perangkat teleconference	1 Paket	-	-			
		Tersedianya lisensi ID Teleconference	1 Paket	-	-			
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah pengadaan titik CCTV	10 titik	-	-	115.734.500	115.711.200	100%
		Jumlah titik CCTV yang dipelihara	20 titik	69 Titik	342%			
	Sub Kegiatan: Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Aplikasi Layanan e-Government yang dibangun/ dikembangkan/ dipelihara oleh Diskominfo	3 Aplikasi	3 Aplikasi	100%	850.182.260	626.072.400	74%
		Terpeliharanya perangkat pembangunan dan pengembangan aplikasi	-	-	-			
		Tersedianya lisensi hak pakai Cpanel	1 Paket	1 Tahun	100%			
		Tersedianya lisensi hak pakai webmail Kota Bogor	1 Paket	1 Tahun	100%			
		Tersedianya Pengembangan Aplikasi Datawarehouse	-	-	-			
		Tersedianya Sewa Layanan Colocation Server Webmail Kota Bogor	1 Tahun	1 Tahun	100%			
		Tersedianya Layanan Cloud Simral Kota Bogor	-	-	-			
		Tersedianya Pendampingan SIMRAL	-	-	-			
		Tersedianya Aplikasi Dashboard khusus covid	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%			
		Tersedianya Memory Server	5 unit	5 unit	100%			
		Tersedianya Harddisk Server	2 Unit	2 Unit	100%			
		Tersedianya Pendampingan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah - Kota Bogor	-	-	-			
		Tersedianya Perangkat Pendukung Pengembangan Aplikasi	1 Unit	1 Unit	100%			
		Tersedianya Workshop Integrasi	1 Pertemuan	1 Pertemuan	100%			

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Kinerja			Pendanaan		%
			Target Renstra	Realisasi Capaian	%	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	
	Sub Kegiatan: Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Terpeliharanya Server Datawarehouse	1 Paket	1 Paket	100%	39.474.910	39.443.700	100%
		Tersedianya Pengembangan Aplikasi Dashboard Pemerintah	1 Paket	-	-			
	Sub Kegiatan: Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Terpeliharanya anjungan untuk promosi	-	-	-	62.219.100	59.730.000	96%
		Tersedianya Sarana Komunikasi Digital	1 Paket	1 Paket	100%			
		Terselenggaranya FGD Smart City dan Sosialisasi Smart City	-	-	-			
		Terselenggaranya Pameran Smart City	-	-	-			
	Sub Kegiatan: Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Perangkat multimedia Bogor Green Room/Command Center	1 Paket	1 Paket	100%	515.592.300	511.687.750	99%
		Terbangunnya dan Meningkatnya Fasilitas Command Center	-	-	-			
		Tersedianya peralatan personal komputer	1 Paket	1 Paket	100%			
	Sub Kegiatan: Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	laporan monev penilaian mandiri Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,97 Indeks	3,11 Indeks	105%	24.255.000	22.170.000	91%
II	Program: Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Keterbukaan Informasi publik	63%	77,5 %	123%	5.441.787.100	5.424.116.222	100%
3	Kegiatan: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase komunitas masyarakat/ mitra strategis pemerintah kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota	85%	85%	100%	4.186.676.600	4.182.555.200	100%
		Persentase PD yang aktif menyebarluaskan informasi melalui media sosial dan website	65%	85%	131%	936.396.100	931.078.600	99%
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD sesuai SOP	85%	85%	100%	318.714.400	310.482.422	97%
		Persentase PPID PD yang aktif	85%	85%	100%			
	Sub Kegiatan: Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Tersedianya Booklet Smart City	1 Paket	1 Paket	100%	936.396.100	931.078.600	99%
		Ketersediaan perangkat penunjang pengelolaan komunikasi dan informasi publik	1 Paket	-	-			
		Jumlah konten informasi publik yang disebarluaskan(konten)	365 konten	-	-			
		Lomba Karya Jurnalis	1 Kegiatan	-	-			

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Kinerja			Pendanaan		%
			Target Renstra	Realisasi Capaian	%	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	
		Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang dikoordinasikan	2 Kegiatan	-	-			
		Jumlah Video	24 konten / tayangan	-	-			
		Konten Audio Visual di Multimedia dan Media Sosial	24 Tayangan	24 Tayangan	100%			
		Perangkat Penunjang Komunikasi Publik	1 Paket	1 Paket	100%			
		kegiatan Bakohumas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%			
		forum Perhumas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%			
	Sub Kegiatan: Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Perangakat Daerah yang di Fasilitasi Dalam Hal Pelayanan Informasi Publik	36 Jumlah Perangkat Daerah	-	-	318.714.400	310.482.422	97%
		Tersusunnya Laporan PPID	40 Lembaga	-	-			
		Presentase terpeliharanya Aplikasi sibadra dan sarana penunjang	80%	-	-			
		Tersedianya Pemeliharaan Aplikasi Sibadra	1 Paket	1 Paket	100%			
		Tersedianya Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat	1 Paket	1 Paket	100%			
	Sub kegiatan: Layanan Hubungan Media	Jumlah penyebaran informasi melalui media TV untuk masyarakat Kota Bogor dan Radio	12 Konten	-	-	4.186.676.600	4.182.555.200	100%
		Jumlah Kerjasama dengan media	180 orang	-	-			
		Jumlah penyebaran informasi melalui advetorial disurat kabar	4 Jenis media (online nasional, online lokal, cetak lokal, elektronik Tv dan radio)	-	-			
		Jumlah kegiatan diseminasi informasi melalui media massa	120 meter	-	-			
		Advertorial dan Analisis Media Cetak, Elektronik dan Online Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%			
		Tersedianya Konten Publikasi	1 Konten	1 Konten	100%			

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Kinerja			Pendanaan		%
			Target Renstra	Realisasi Capaian	%	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	
		Terselenggaranya Jumpa Pers Wartawan	1 Tahun	1 Tahun	100%			
		Tenaga konsultan analisis media masa	6 Orang	6 Orang	100%			
		Penyebaran Informasi Kebijakan Pemerintah Melalui Media Spanduk	466 Meter	466 Meter	100%			
III	Program: penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten / kota	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	BB	A	-	13.020.000	13.020.000	100%
		Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah	85%	85%	100%	389.882.000	357.040.836	92%
		Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100%	100%	100%	12.552.542.506	11.941.641.414	95%
4	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	13.020.000	13.020.000	100%
	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	13.020.000	13.020.000	100%
5	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	100%	9.427.877.562	8.893.705.817	94%
	Sub kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	100%	9.427.877.562	8.893.705.817	94%
6	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	100%	100%	100%	476.826.700	438.586.496	92%
	Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100%	100%	100%	13.789.000	13.675.000	99%
	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket	4 Paket	100%	254.969.300	239.488.400	94%
	Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	100%	20.818.400	20.746.600	100%
	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	100%	187.250.000	164.676.496	88%

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Kinerja			Pendanaan		%
			Target Renstra	Realisasi Capaian	%	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	
7	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	144.598.800	143.625.000	99%
	Sub Kegiatan: Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Paket	-	-	-	-	0%
	Sub Kegiatan: Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor lainnya	4 Paket	2 Paket	50%	144.598.800	143.625.000	99%
	Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Paket	-	-	-	-	-
8	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	2.503.239.444	2.465.724.101	99%
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi	100%	100%	100%	12.000.000	1.909.718	16%
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 orang	4 orang	100%	2.491.239.444	2.463.814.383	99%
		Tersedianya Operator Pengelola Layanan Pengaduan Masyarakat	13 orang	13 orang	100%			
		Tersedianya outsourching Operator bogor green room	1 paket	1 paket	100%			
		Tersedianya Outsourcing CCTV	1 paket	1 paket	100%			
		Tersedianya Outsourcing Desainer Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi	1 paket	1 paket	100%			
		Tersedianya Outsourcing Jaringan Infrastruktur	1 paket	1 paket	100%			
		Tersedianya Outsourcing Pengelola Media Komunikasi Publik	8 orang	8 orang	100%			
		Tersedianya Outsourcing Programmer Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi	1 paket	1 paket	100%			
		Tersedianya Outsourcing Pusat Data	1 paket	1 paket	100%			
		Tersedianya Pengelola Portal Data	2 orang	2 orang	100%			

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Kinerja			Pendanaan		%
			Target Renstra	Realisasi Capaian	%	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	
		Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Penyebaran Informasi	2 orang	2 orang	100%			
		Tersedianya jasa supir	2 orang	2 orang	100%			
		Hutang TA 2020	1 Paket	1 Paket	100%			
9	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	389.882.000	357.040.836	92%
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13 Kendaraan	13 Kendaraan	100%	243.980.000	220.921.669	91%
		Tersedianya Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor	1 Paket	1 Paket	100%			
	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1 Paket	1 Paket	100%	53.242.000	48.450.000	91%
		Tersedianya Pemeliharaan Komputer-Komputer	1 Paket	1 Paket	100%			
		Tersedianya suku cadang alat angkutan	1 Paket	1 Paket	100%			
	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Jasa Konsultansi Perencanaan	2 Paket	-	-	92.660.000	87.669.167	95%
		Tersedianya Jasa Konsultansi Pengawas	2 Paket	-	-			
		Tersedianya Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2 Paket	3 Paket	100%			
		Tersedianya Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	1 Paket	1 Paket	100%			
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik								
IV	Program: Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	76%	82%	108%	159.103.200	155.821.100	98%
		Persentase Metadata Statistik Sektoral yang tersedia	0,2%	0,4%	200%	81.130.000	80.882.331	100%
10		Persentase PD yg menyediakan data statistik sektoral sesuai dengan standar	76%	82%	108%	43.049.200	40.059.200,00	93%

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Kinerja			Pendanaan		%
			Target Renstra	Realisasi Capaian	%	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	
	Kegiatan: Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Statistik Sektoral yang disajikan	76%	82%	108%	81.130.000	80.882.331	100%
		Pemenuhan hardware dan software sesuai kebutuhan kebutuhan, pengolahan data	1 paket	1 paket	100%	116.054.000	115.761.900	100%
	Sub Kegiatan: Membangun Metadata Statistik Sektoral	Buku induk statistik sektoral	1 Paket	1 Paket	100%	81.130.000	80.882.331	100%
		Tersusunnya metadata statistik sektoral	1 Paket	1 Paket	100%			
	Sub Kegiatan: Pengembangan Infrastruktur	Jumlah hardware dan software yang tersedia sesuai kebutuhan kebutuhan, pengolahan data	1 paket	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan: Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi/ Bintek/Workshop/ Seminar bagi SDM Perangkat daerah	100%	-	-	43.049.200	40.059.200,00	93%
		Tersedianya hasil produk Data Statistik Sektoral yang dipublikasikan	1 Media	1 Media	100%			
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Terselenggaranya satu data statistik sektoral	2 Paket	2 Paket	100%	116.054.000	115.761.900	100%
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Persandian								
V	Program: Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Level 1	Level 1	-	165.217.000	164.633.925	100%
11	Kegiatan: Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Kelengkapan Penerapan Standar Indeks KAMI	80%	80%	100%	165.217.000	164.633.925	100%
		Persentase PD yang aktif menggunakan komunikasi sandi (email kota bogor)	25%	25%	100%	-	-	
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	presentase insiden keamanan informasi yang ditindaklanjuti	100%	-	-	165.217.000	164.633.925	100%
		Tersedianya Antivirus	12 Lisensi	12 Lisensi	100%			
		Tersedianya Firewall	1 Lisensi	1 Lisensi	100%			
		Tersedianya Sistem Operasi (Windows)	10 Lisensi	10 Lisensi	100%			
		Tersedianya Software (Microsoft Office)	5 Lisensi	5 Lisensi	100%			
		Tersedianya SSL	1 Lisensi	1 Lisensi	100%			

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Kinerja			Pendanaan		%
			Target Renstra	Realisasi Capaian	%	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	
	Sub Kegiatan: Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PD yg sudah menerapkan tanda tangan digital/sertifikat elektronik	9 perangkat Daerah	-	-	-	-	-
		Jumlah aplikasi yg telah di deteksi kerentanan keamanan informasi	1 Aplikasi	-	-			
		Jumlah peserta sosialisasi keamanan informasi	150 Orang	-	-			
		JUMLAH				**25.633.406.676**	**24.717.723.498**	

Sumber: Perubahan Renstra Diskominfo Kota Bogor Tahun 2019-2024

Tabel 2.15
Pencapaian Kinerja dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA		CAPAIAN (%)	ANGGARAN		CAPAIAN (%)
						TARGET	REALISASI		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Urusan Komunikasi dan Informatika									25.126.300.578	24.702.108.136	98,31
I	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten / kota			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	A	A	100	11.419.200	11.419.200	100
				Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat	Point	3,40	3,40	100	13.677.257.068	13.307.903.074	97,30
1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	A	A	100	11.419.200	11.419.200	100

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA		CAPAIAN (%)	ANGGARAN		CAPAIAN (%)
						TARGET	REALISASI		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Perangkat Daerah		Lingkup Perangkat Daerah							
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	100	11.419.200	11.419.200	100
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	9.891.407.900	9.663.198.762	98
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	686	686	100	9.891.407.900	9.663.198.762	98
3		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	%	100	100	100	533.795.400	468.341.251	88
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100	6.412.500	6.193.500	97
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100	216.259.100	171.206.700	79
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan	Paket	1	1	100	12.135.000	12.105.000	100

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA		CAPAIAN (%)	ANGGARAN		CAPAIAN (%)
						TARGET	REALISASI		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				dan Penggandaan yang Disediakan							
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100	298.988.800	278.836.051	93
4		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	%	100	100	100	202.491.500	202.398.400	100
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8	8	100	174.439.900	174.382.000	100
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	4	4	100	28.051.600	28.016.400	100
5		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100	2.692.816.268	2.642.996.119	98

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA		CAPAIAN (%)	ANGGARAN		CAPAIAN (%)
						TARGET	REALISASI		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100	18.000.000	2.162.522	12
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100	2.674.816.268	2.645.158.641	99
6		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yg terpelihara sesuai RPBMD	%	100	100	100	356.746.000	330.968.542	93
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	13	13	100	277.750.000	254.416.925	92
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	50	100	44.698.000	43.833.000	98
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	1	1	100	34.298.000	32.718.617	95

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA		CAPAIAN (%)	ANGGARAN		CAPAIAN (%)
						TARGET	REALISASI		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
II	Program Informasi Dan Komunikasi Publik			Nilai Keterbukaan Informasi publik	Level	Cukup Informatif	Cukup Informatif	100	4.773.983.100	4.769.220.000	99,90
7		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota	%	90	90	100	3.573.526.800	3.571.466.800	100
				Persentase PD yang aktif menyebarluaskan informasi melalui media sosial dan website	%	66	100	151,52	995.093.000	993.599.500	100
				Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD sesuai SOP	%	90	93,6	104	205.363.300	204.153.700	99
				Persentase PPID PD yang aktif	%	90	90	100	-`	-`	-
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan	Dokumen	3	3	100	995.093.000	993.599.500	100

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA		CAPAIAN (%)	ANGGARAN		CAPAIAN (%)
						TARGET	REALISASI		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik							
			Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	1	1	100	205.363.300	204.153.700	99
			Layanan Hubungan Media	jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan	4	4	100	3.573.526.800	3.571.466.800	100
III	Program Aplikasi Informatika			Nilai aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	Indeks	2,72	3,5	128,68	55.582.000	53.338.550	95,96
				Nilai aspek Perenca-naan Strategis SPBE	Indeks	3,1	1,7	54,84	42.660.600	42.565.000	99,78
				Nilai aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	2,34	2,50	106,84	6.224.174.610	6.202.972.912	99,66
				Nilai aspek Penera-pan Manajemen SPBE	Indeks	2,8	1,0	35,71	341.224.000	314.689.400	92,22
8		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah		Persentase Pengelolaan Domain, Sub Domain, dan IP Address milik Pemerintah Kota Bogor	%	100	100	100	66.000.000	65.868.000	100
				Persentase Perangkat Daerah yang terhubung	%	100	100	100	3.651.151.000	3.642.433.312	100

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA		CAPAIAN (%)	ANGGARAN		CAPAIAN (%)
						TARGET	REALISASI		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Daerah Kabupaten/Kota		Fiber Optik milik Pemerintah Kota Bogor							
				Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	level	3	5	100			
				Tingkat Kematangan Audit Infrastruktur	level	3	2	66,67			
			Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota/Kabupaten	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	1	1	100	66.000.000	65.868.000	100
			Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	138	138	100	3.651.151.000	3.642.433.312	100
9		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Arsitektur SPBE Instansi	Level	3	3	100	.-		

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA		CAPAIAN (%)	ANGGARAN		CAPAIAN (%)
						TARGET	REALISASI		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kabupaten/ Kota		Pusat/ Pemerintah Daerah							
				Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	Level	3	2	66,67			
				Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Manajemen Data	Level	3	3	100			
				Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Pembangunan Aplikasi SPBE	Level	3	4	133,33			
				Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Layanan Pusat Data	Level	3	4	133,33			
				Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait	Level	3	3	100			

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA		CAPAIAN (%)	ANGGARAN		CAPAIAN (%)
				TARGET	REALISASI		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah							
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	Level	3	3	100			
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Manajemen Keamanan Informasi	Level	3	1	33,33			
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Audit TIK	Level	3	4	133,33			
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Tim Koordinasi SPBE	Level	3	4	133,33	42.660.600	42.565.000	100

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA		CAPAIAN (%)	ANGGARAN		CAPAIAN (%)
						TARGET	REALISASI		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah							
				Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	Level	3	1	33,33	55.582.000	53.338.550	100
				Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	Level	3	1	33,33			
				Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	Level	3	2	66,67			
				Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	Level	3	3	100			
				Tingkat Kematangan Penerapan Manaje-men Risiko SPBE	Level	3	1	33,33			
				Tingkat Kematangan	Level	3	2	66,67	1.720.825.210	1.709.656.300	99

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA		CAPAIAN (%)	ANGGARAN		CAPAIAN (%)
				TARGET	REALISASI		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Layanan Pusat Data							
		Tingkat kematangan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya TI dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Tahun	1	1	100	272.746.200	272.124.400	100
		Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	Level	3	1	33,33	372.501.900	372.266.800	100
		Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	Level	3	4	133,33	413.696.500	412.748.500	100
		Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	Level	2	3	150	-	-	-
		Tingkat Kematangan Penerapan	Level	3	1	33,33	68.477.800	42.565.000	62

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA		CAPAIAN (%)	ANGGARAN		CAPAIAN (%)
						TARGET	REALISASI		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Manajemen Layanan SPBE							
				Tingkat Kematangan Audit Aplikasi SPBE	Level	3	2	66,67	-	-	-
			Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen	1	2	200	55.582.000	53.338.550	96
			Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	4	1	25	1.720.825.210	1.709.656.300	99
			Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dokumen	1	1	100	72.304.500	72.180.700	100
			Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Perangkat Daerah	5	5	100	300.197.400	300.086.100	100

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA		CAPAIAN (%)	ANGGARAN		CAPAIAN (%)
						TARGET	REALISASI		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	2	2	100	413.696.500	412.748.500	100
			Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplemen-tasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	1	1	100	68.477.800	68.477.800	100
			Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	1	100	272.746.200	272.124.400	100
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	1	1	100	42.660.600	42.565.000	100
Urusan Statistik									162.624.000	159.424.400	98,03
IV	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral			Persentase ketersediaan data statistik sektora	%	79	86	108,86	120.224.100	117.744.500	97,94

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA		CAPAIAN (%)	ANGGARAN		CAPAIAN (%)
						TARGET	REALISASI		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Persentase Metadata Statistik Sektoral yang tersedia	%	0,3	1,03	343,33	42.399.900	41.679.900	98,30
10		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase PD yg menyediakan data statistik sektoral sesuai dengan standar	%	79	86	108,86	41.073.700	41.073.200	100
				Jumlah Data Statistik Sektoral yang disajikan	%	79	86	108,86	42.399.900	41.679.900	98
				Pemenuhan hardware dan software sesuai kebutuhan kebutuhan, pengolahan data	Paket	1	1	100	79.150.400	76.671.300	97
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Dokumen	2	2	100	79.150.400	76.671.300	97
			Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu	Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam peningkatan mutu statistik	Orang	0	0	0	41.073.700	41.073.200	100

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA		CAPAIAN (%)	ANGGARAN		CAPAIAN (%)
						TARGET	REALISASI		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Statistik Daerah yang Terintegrasi	daerah yang terintegrasi							
			Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah metadata statistik Sektoral yang dihimpun	Dokumen	1	1	100,00	42.399.900	41.679.900	98
Urusan Persandian									125.196.500	124.996.900	99,84
V	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi			Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Level	2	2	100	125.196.500	124.996.900	99,84
11		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		Persentase Tingkat Kelengkapan Penerapan Standar Indeks KAMI	%	81	81	100	125.196.500	124.996.900	99,84
				jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi	Kebijakan	1	1	100			
			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1	1	100	125.196.500	124.996.900	99,84
								JUMLAH	25.414.121.078	24.986.529.436	98,32

Sumber: Diskominfo Kota Bogor Tahun 2022

Tabel 2.16
Pencapaian Kinerja dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA		CAPAIAN (%)	ANGGARAN		CAPAIAN (%)
						TARGET	REALISASI		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Urusan Komunikasi dan Informatika									**22.180.876.128**	**21.659.695.269**	**97,65**
I	**Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten / kota**			**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah**	**Nilai**	**A**	**A**	**100**	**9.750.400**	**9.750.400**	**100**
				Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat	**Point**	**3,45**	**3,53**	**102,31**	**12.931.280.011**	**12.424.398.546**	**96,08**
1		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah**	**Nilai**	**A**	**A**	**100**	**9.750.400**	**9.750.400**	**100**
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	100	9.750.400	9.750.400	100
2		**Administrasi Keuangan**		**Persentase Pemenuhan Administrasi**	**%**	**100**	**101,45**	**101,45**	**10.255.361.371**	**9.792.242.932**	**95,48**

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA		CAPAIAN (%)	ANGGARAN		CAPAIAN (%)
						TARGET	REALISASI		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Perangkat Daerah		**Keuangan Perangkat Daerah**							
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	686	696	101,45	10.255.361.371	9.792.242.932	95,48
3		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah**	**%**	**100**	**100**	**100**	**342.666.400**	**341.711.219**	**99,72**
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100	6.126.000	6.069.100	99,07
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7	7	100	104.321.400	104.083.778	99,77
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100	14.464.000	14.295.000	98,83
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Laporan	1	1	100	217.755.000	217.263.341	99,77

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA		CAPAIAN (%)	ANGGARAN		CAPAIAN (%)
						TARGET	REALISASI		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			dan Konsultasi SKPD	dan Konsultasi SKPD							
4		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**%**	**100**	**100**	**100**	**2.065.832.240**	**2.034.736.751**	**98,49**
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100	5.000.000	2.560.791	51,22
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100	2.060.832.240	2.032.175.960	98,61
5		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Barang Milik Daerah yg terpelihara sesuai RPBMD**	**%**	**100**	**100**	**100**	**267.420.000**	**255.707.644**	**95,62**

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA		CAPAIAN (%)	ANGGARAN		CAPAIAN (%)
						TARGET	REALISASI		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	13	13	100	224.830.0000	213.345.644	94,89
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	50	100	42.590.000	42.362.000	99,46
II	**Program Informasi Dan Komunikasi Publik**			**Nilai Keterbukaan Informasi publik**	**Level**	**Cukup Informatif**	**Menuju Informatif**	**133,33**	**4.891.133.283**	**4.881.104.944**	**99,79**
6		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**		**Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota**	**%**	**95**	**97**	**102,10**	**3.579.903.000**	**3.579.563.000**	99,99
				Persentase PD yang aktif menyebarluaskan	**%**	**67**	**67**	**100**	**964.254.083**	**963.012.114**	99,87

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA		CAPAIAN (%)	ANGGARAN		CAPAIAN (%)
						TARGET	REALISASI		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				informasi melalui media sosial dan website							
				Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD sesuai SOP	**%**	**95**	**95**	**100**	**346.979.200**	**338.529.830**	97,56
				Persentase PPID PD yang aktif	%	**95**	**95**	**100**	**-`**	**-`**	-
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	1	1	100	964.251.083	963.012.114	99,87
			Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	3	3	100	346.979.200	338.529.830	97,56
			Layanan Hubungan Media	jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan	4	4	100	3.579.903.000	3.579.563.000	99,99
III	**Program Aplikasi Informatika**			**Nilai aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE**	**Indeks**	**3,20**	**3,70**	**115,62**			

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA		CAPAIAN (%)	ANGGARAN		CAPAIAN (%)
						TARGET	REALISASI		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Nilai aspek Perenca-naan Strategis SPBE	Indeks	3,20	3,00	93,75	71.416.000	71.255.000	100
				Nilai aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	3,30	3,50	106,06	3.923.130.834	3.919.433.335	99,90
				Nilai aspek Penera-pan Manajemen SPBE	Indeks	2,90	2,88	99,31	354.165.600	353.753.044	99,88
7		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Pengelolaan Domain, Sub Domain, dan IP Address milik Pemerintah Kota Bogor	%	100	100	100	66.000.000	65.867.400	99,80
				Persentase Perangkat Daerah yang terhubung Fiber Optik milik Pemerintah Kota Bogor	%	100	100	100	2.985.523.600	2.985.040.164	99,98

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA		CAPAIAN (%)	ANGGARAN		CAPAIAN (%)
						TARGET	REALISASI		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	**level**	**4**	**3**	**75**			
				Tingkat Kematangan Audit Infrastruktur	**level**	**4**	**3**	**75**			
			Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota/Kabupaten	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	1	1	100	66.000.000	65.867.400	99,80
			Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	138	152	110,14	2.985.523.600	2.985.040.164	99,98
8		**Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah**		**Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Arsitektur**	**Level**	**3**	**4**	**133,33**	**.**		

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA		CAPAIAN (%)	ANGGARAN		CAPAIAN (%)
				TARGET	REALISASI		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Daerah Kabupaten/ Kota	SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah							
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	Level	3	3	100			
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Manajemen Data	Level	3	4	133,33			
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Pembangunan Aplikasi SPBE	Level	3	4	133,33			
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal	Level	3	4	133,33			

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA		CAPAIAN (%)	ANGGARAN		CAPAIAN (%)
				TARGET	REALISASI		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		terkait Layanan Pusat Data							
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	Level	3	3	100			
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	Level	3	4	133,33			
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Manajemen	Level	3	4	133,33			

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA		CAPAIAN (%)	ANGGARAN		CAPAIAN (%)
				TARGET	REALISASI		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Keamanan Informasi							
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Audit TIK	**Level**	**3**	**4**	**133,33**			
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	**Level**	**3**	**3**	**100**	**71.416.000**	**71.255.000**	**99,77**
		Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	**Level**	**3**	**3**	**100**			
		Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	**Level**	**3**	**3**	**100**			

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA		CAPAIAN (%)	ANGGARAN		CAPAIAN (%)
				TARGET	REALISASI		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	Level	3	3	100			
		Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	Level	3	3	100			
		Tingkat Kematangan Penerapan Manaje-men Risiko SPBE	Level	3	3	100			
		Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	Level	3	3	100	306.931.834	306.815.559	99,96
		Tingkat kematangan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya TI dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Tahun	1	1	100	354.165.600	353.753.044	99,88

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA		CAPAIAN (%)	ANGGARAN		CAPAIAN (%)
				TARGET	REALISASI		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	Level	3	3	100	37.239.400	37.239.400	100
		Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	Level	3	4	133,33	527.436.000	524.470.812	99,44
		Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	Level	2	4	200	-	-	
		Tingkat Kematangan Penerapan Manaje-men Layanan SPBE	Level	3	3	100	-	-	
		Tingkat Kematangan Audit Aplikasi SPBE	Level	3	3	100	-	-	

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA		CAPAIAN (%)	ANGGARAN		CAPAIAN (%)
						TARGET	REALISASI		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	1	1	100	306.931.834	306.815.559	99,96
			Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelengga-raan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dokumen	1	1	100	37.239.400	37.239.400	100
			Pengembangan Aplikasi dan ProsesBisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	2	3	150	527.436.000	524.470.812	99,44
			Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementa-sikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	1	0	0	-	-	0
			Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan	Dokumen	1	1	100	354.165.600	353.753.044	99,88

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA		CAPAIAN (%)	ANGGARAN		CAPAIAN (%)
						TARGET	REALISASI		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Komunikasi Pemerintah Daerah							
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	1	1	100	71.416.000	71.255.000	99,77
Urusan Statistik									**137.571.400**	**136.788.998**	**99,43**
IV	**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**			**Persentase ketersediaan data statistik sektora**	**%**	**84**	**88**	**104,76**	**95.648.200**	**95.540.200**	**99,88**
				Persentase Metadata Statistik Sektoral yang tersedia	**%**	**2**	**5,96**	**298**	**41.923.200**	**41.248798**	**98,39**
9		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota**		**Persentase PD yg menyediakan data statistik sektoral sesuai dengan standar**	**%**	**84**	**88**	**104,76**	**45.255.600**	**45.255.600**	**100**
				Jumlah Data Statistik Sektoral yang disajikan	**%**	**84**	**88**	**104,76**	**41.923.200**	**41.248798**	**98,39**
				Pemenuhan hardware dan software sesuai kebutuhan kebutuhan, pengolahan data	**Paket**	**1**	**1**	**100**	**50.392.600**	**50.284.600**	**99,78**

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA		CAPAIAN (%)	ANGGARAN		CAPAIAN (%)
						TARGET	REALISASI		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Dokumen	1	1	100	2.839.200	2.721.600	95,85
			Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	Orang	72	60	83,33	45.255.600	45.255.600	100
			Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah metadata statistik Sektoral yang dihimpun	Dokumen	1	1	100	39.084.000	38.527.198	98,57
			Pengembangan Infrastruktur	Jumlah infrastruktur statistik	Unit	1	1	100	50.392.600	50.284.600	99,78
Urusan Persandian									**94.100.000**	**93.981.600**	**99,87**
V	**Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**			**Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)**	**Level**	**2**	**2**	**100**	**94.100.000**	**93.981.600**	**99,87**
10		**Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan**		**Persentase Tingkat Kelengkapan Penerapan Standar Indeks KAMI**	**%**	**82**	**81**	**98,7**	**94.100.000**	**93.981.600**	**99,87**

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA		CAPAIAN (%)	ANGGARAN		CAPAIAN (%)
						TARGET	REALISASI		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		**Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi**	**Kebijakan**	**1**	**1**	**100**			
			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1	1	100	94.100.000	93.981.600	99,87
								JUMLAH	**22.412.547.528**	**21.890.465.867**	**97,67**

Sumber: Diskominfo Kota Bogor Tahun 2023

2.3.2. Capaian dan Perjalanan Inovasi

Pada periode sebelumnya, pada tahun 2015 Dinas Komunikasi dan Informatika yang pada saat itu bernama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian membuat inovasi Fasilitas E-Govt Center (Help Desk IT Support Level Kota) dengan semula diberi nama Lab-Rice yang berfungsi sebagai Help Desk IT Support Level Kota yang terus berkembang hingga hari ini dengan nama baru yaitu E-Govt Center pada tahun 2019 di gedung Ex-DPRD Kota Bogor yang sekarang sudah berpindah ke gedung Diskominfo Balaikota Bogor lantai 2. Fasilitas E-Govt Center ini bertujuan untuk memudahkan OPD dalam konsultasi terkait implementasi aplikasi, *sharing* ilmu, penggunaan teknis aplikasi baik dari level *end-user* hingga level *backend-programmer*, dan lain sebagainya yang sesuai dengan kebutuhan OPD dalam pelaksanaan penggunaan aplikasi pada lingkup Pemerintah Daerah Kota Bogor.

Pada Tahun 2015 sampai dengan 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan inovasi sebanyak 21 inovasi, yang dilaksanakan oleh Bidang *e-Government*, Bidang Jaringan, Domain dan Persandian, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, dan Bidang Statistik Sektoral.

Adapun keseluruhan inovasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.17
Inovasi Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Inovasi	Tahun Pembuatan	Keterangan
1	Fasilitas E-Govt Center (Help Desk IT Support Level Kota)	2015	Dibangun pada tahun tahun 2015 dengan semula diberi nama Lab-Rice yang berfungsi sebagai Help Desk IT Support Level Kota yang terus berkembang hingga hari ini dengan nama baru yaitu E-Govt Center. Fasilitas E-Govt Center ini bertujuan untuk memudahkan OPD dalam konsultasi terkait implementasi aplikasi, sharing ilmu, penggunaan teknis aplikasi baik dari level end-user hingga level backend-programmer, dan lain sebagainya yang sesuai dengan kebutuhan OPD dalam pelaksanaan penggunaan aplikasi pada lingkup Pemerintah Daerah Kota Bogor

No	Inovasi	Tahun Pembuatan	Keterangan
2	Peta Rawan Kamtibmas	2017	Aplikasi Peta Rawan Kamtibmas merupakan aplikasi yang digunakan untuk memetakan titik-titik kerawanan keamanan ketertiban masyarakat dan kerawanan bencana di wilayah Kota Bogor. - Kategori kerawanan Kamtibmas yang di data meliputi: Tempat Nongkrong, Tempat Mabuk, Peredaran Miras, Narkoba, Perjudian, Balapan Liar, Tawuran, Tindak Asusila, Jalan Gelap Sepi, Hipnotis, Penodongan, Penjambretan, Begal, Pencurian, Curanmor, Pembunuhan, Rawan PKL, Parkir Sembarangan, Rebutan Lahan Parkir, Pembuangan Sampah Liar, Kecelakaan, Kecelakaan Kereta Api, dan Konflik Pertanahan - Kategori Bencana yang di data meliputi: Rawan Bencana, Kebakaran, Longsor, Banjir, dan Pohon Tumbang Aplikasi menampilkan: - Nama Kategori Kamtibmas/ Bencana, Titik Koordinat, Kecamatan, Kelurahan, Foto, baik data peta maupun tabel
3	SiBADRA	2019	Aplikasi Pelayanan Aduan, Saran, dan Komunikasi Masyarakat Kota Bogor kepada Pemerintah Kota Bogor merupakan pengembangan lanjutan dari aplikasi BISA yang memiliki fungsi sejenis yang dibangun pada tahun 2017
4	Bogor Single Windows	2020	Pengembangan Aplikasi Bogor Single Window adalah sebagai platform Layanan dan Informasi terpusat untuk masyarakat Kota Bogor dari pemanfaatan data yang telah masuk ke Data Warehouse Kota Bogor, dengan tujuan: - Layanan Publik Pemerintah Kota Bogor yang lebih baik, - Meningkatkan kultur dan budaya kerja, - Tersedianya pusat database dan framework Smart City Kota Bogor - Kemudahan sinergi dan kolaborasi antar Perangkat Daerah
5	Dashboard Covid-19	2020	Informasi publik mengenai penyebaran kasus Covid-19 di Kota Bogor
6	DETEKTIF COVID	2020	Sebagai Media Komunikasi dan Informasi penanganan Covid-19 di Kota Bogor Sebagai DSS (Decision Support System) bagi Pemerintah untuk penentuan kebijakan penanganan Covid -19 seperti Level PPKM, serta menentukan Zona Wilayah per-kelurahan berdasarkan jumlah konfirmasi dan suspect Covid
7	APLIKASI JAGA ASA	2020	Mencegah data ganda penerima bantuan sosial dan antrian pembagian bantuan sosial
8	APLIKASI TATA NASKAH DINAS	2020	Transformasi pengelolaan surat dari konvensional menjadi digital yang dkembangkan sejak tahun 2017 dan mulai diimplementasikan secara terbatas di tahun 2019
9	Smart Posyandu	2020	Transformasi Digital dari layanan administrasi Posyandu paper base menjadi digital base yang di dalamnya memiliki fitur pendukung dalam penanggulangan stunting
10	Bansos Swadaya	2020	Bansos Swadaya adalah aplikasi digunakan untuk memberikan kemudahan bagi Tim Posko Gugus Tugas Covid-19, Dinas Sosial, BPBD, dan Kelurahan se-Kota Bogor dalam Pengelolaan Administrasi Bantuan Sosial Khusus Covid-19 di lingkungan Posko Gugus Tugas Covid-19

No	Inovasi	Tahun Pembuatan	Keterangan
11	Bogor Berkebun	2020	Gerakan Bogor Berkebun adalah aktivitas pengembangan pertanian perkotaan (budidaya, pengolahan dan pemasaran) dengan memanfaatkan lahan dan sumberdaya yang ada untuk menghasilkan berbagai produk pertanian, peternakan dan perikanan bernilai ekonomi tinggi yang dilakukan secara masif oleh berbagai elemen masyarakat berbasis komunitas/ kelompok, dalam rangka penguatan ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan dan percepatan pemulihan ekonomi Kota Bogor
12	Data Ware House	2021	Menciptakan Big Data Kota Bogor untuk terciptanya preservasi data, integrasi dan interoperabilitas data. Data Ware House diinisisasi sejak tahun 2019.
13	BOGOR BERLARI	2021	Aplikasi Pendukung Pemulihan Ekonomi Kota Bogor (Bogor Berlari) sebagai platform Informasi dan produk UMKM Kota Bogor, dengan tujuan meningkatkan daya tarik masyarakat terhadap produk UMKM Kota Bogor; tersedianya data UMKM Kota Bogor; dan sebagai media promosi produk UMKM Kota Bogor.
14	SIPEKA PPID (Sistem Informasi Pendukung Keputusan PPID)	2021	Bertujuan untuk memudahkan pengukuran kelengkapan administrasi PPID terhadap indikator yang telah ditetapkan pada tiap OPD dalam rangka keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik, sehingga monitoring dan evaluasi PPID pada tiap OPD jadi lebih mudah.
15	Tim Support Multimedia Tingkat Kota	2021	Tim kerja yang membantu menyediakan informasi dalam bentuk konten multimedia melalui website maupun media sosial
16	Podcast	2022	Radio sipatahunan sebagai radio daerah tidak dapat mengudara sebagaimana aturan yang berlaku. Untuk itu Diskominfo menggunakan Podcast sebagai media alternatif radio yang bertujuan untuk berbagi informasi dan media komunikasi
17	Cloud Virtuali Server	2022	Sehubungan dengan banyaknya jumlah pengembangan dan pembangunan aplikasi milik perangkat daerah yang harus dikelola oleh Pusat Data yang tidak sebanding dengan jumlah perangkat server yang dimiliki dan dalam rangka peningkatan teknologi pengelolaan server di pusat data maka dibutuhkan pengadaan server dengan spesifikasi memadai dan sesuai dengan perkembangan teknologi yaitu dengan menggunakan teknologi virtualisasi server
18	Tim Asesmen Standarisasi Aplikasi dan Domain	2022	1. Mewujudkan kemampuan interoperabilitas antar sistem informasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kota Bogor; 2. Menggali lebih detail kebutuhan dasar (requirement) dasar dalam pembangunan interoperabilitas antar sistem informasi di lingkungan Pemerintah Kota Bogor; 3. Melakukan asesmen atas permohonan hosting dan sub-domain; 4. Menyusun pola atau kerangka dasar (framework) dalam pembangunan interoperabilitas antar sistem informasi; 5. Menetapkan pola pemetaan data dan informasi yang harus dipenuhi oleh setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor; 6. Menetapkan standar acuan aplikasi dan sistem informasi; Melakukan sosialisasi yang intensif

No	Inovasi	Tahun Pembuatan	Keterangan
			dan efektif perihal operabilitas dan standar acuan yang harus diikuti oleh seluruh perangkat daerah guna terwujudnya interoperabilitas antar sistem informasi; 7. Menyusun bahan rekomendasi hasil asesmen;
19	Tim Pengelola Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kota Bogor	2022	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Merupakan sistem untuk mendukung interoperabilitas data antar layanan Pemerintah bersekala Nasional. Salah satu aplikasi SPLP yang digunakan oleh Pemerintah Kota Bogor adalah aplikasi SPLP yang dibangun oleh Kementerian Kominfo. Aplikasi-aplikasi Pemerintah Kota Bogor saling berintegrasi menggunakan fasilitas interoperabilitas yang ada di aplikasi SPLP ini.
20	Aplikasi Portal Data Kota Bogor	2022-2023	1. *Redevelop* sistem aplikasi portal data sesuai dengan aturan standarisasi dari Diskominfo (Tim Asesmen Standarisasi Aplikasi dan Domain) 2. Pelaksanaan Integrasi Data pada Aplikasi Portal Data Kota Bogor dengan Portal Data Provinsi Jawa Barat. Fungsi portal data sebagai sarana dalam bentuk aplikasi untuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian Satu Data Kota Bogor. 3. Portal Data Kota Bogor sudah terintegrasi dengan Satu Data Indonesia, dapat dilihat pada laman https://data.go.id/home atau https://analitik.data.go.id/superset/dashboard/monitor-portal/ 4. Penambahan metadata pada setiap dataset yang ada pada Portal Data Kota Bogor sesuai dengan standar Badan Pusat Statistik
21	Bogor Single Windows	2023	1. *Redevelop* aplikasi Bogor Single Windows sesuai dengan aturan standarisasi dari Diskominfo (Tim Asesmen Standarisasi Aplikasi dan Domain) 2. Pembuatan BSW Masyarakat, BSW ASN, dan Landing Page BSW 3. Implementasi penggunaan Single-Sign On untuk aplikasi Pemerintah Kota Bogor lainnya 4. Penggunaan integrasi melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kota Bogor untuk layanan di aplikasi BSW

Sumber: Diskominfo Kota Bogor Tahun 2023

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Kekuatan/ *Strength* (S)

- Tersedianya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Informatika dan Komunikasi;

- Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 130 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Tersedianya beberapa peraturan Wali Kota Bogor dibidang Teknologi Informasi dan penyelenggaraan *e-Government*;
- Terintegrasinya layanan pengaduan non kedaruratan dan kedaruratan untuk mengatasi adanya kesenjangan layanan pengaduan masyarakat.
- Aparatur Diskominfo memiliki integritas dan komitmen untuk menjadikan Diskominfo sebagai regulator dan *service provider* dalam implementasi SPBE di Kota Bogor.

b. Kelemahan/ *weakness* (W)

- Gedung kantor dan perlengkapan kantor yang kurang representatif;
- Terbatasnya ketersediaan anggaran untuk meningkatkan infrastruktur TIK;
- Keterbatasan dalam pengembangan dan pemeliharaan prasarana dan sarana TIK;
- Terbatasnya pegawai/aparatur yang berkompetensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Statistik dan Persandian khususnya tenaga teknis dan ahli;
- Terbatasnya prasarana dan sarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Statistik dan Persandian;
- Lokasi penempatan ruang server masih belum memenuhi standar;
- Belum optimalnya pengamanan informasi dan persandian;
- Belum terintegrasinya semua Sistem Informasi dan Database Perangkat Daerah;
- Belum optimalnya diseminasi informasi dan pengembangan aplikasi TIK.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Kekuatan/ *Strength* (S)

- Komitmen pimpinan daerah;
- Perangkat daerah sudah memiliki Sistem Informasi untuk data dan pelayanannya.
- Dukungan dari ekosistem dan komunitas relawan TIK Kota Bogor.

b. Kelemahan/ *weakness* (W)

- Sistem Informasi yang dibangun di perangkat daerah masih ada beberapa yang belum sesuai dengan standar sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota;
- Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap perkembangan TIK yang cukup pesat.

Berdasarkan analisis terhadap capaian Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2025-2026 dapat digambarkan bahwa terdapat peluang dan tantangan dalam pengembangan pelayananan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor pada tahun yang akan datang antara lain:

1. Peluang

a. Adanya Peta Rencana dan Arsitektur SPBE Kota Bogor Tahun 2022-2027;
b. Adanya *Masterplan Smart City* Kota Bogor Tahun 2022-2027;
c. Komitmen Kepala Daerah terhadap penerapan *e-Government* dan perwujudan *Smart City* Kota Bogor;
d. Komitmen kepala daerah untuk mendukung peningkatan dan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
e. Penggunaan media sosial dalam penyebaran informasi pemerintah daerah;
f. Regulasi pemerintah pusat tentang penyelenggaraan Statistik Sektoral;
g. Bimbingan teknis aparatur tentang keamanan sistem informasi.

2. Tantangan

a. Implementasi Peta Rencana dan Arsitektur SPBE Kota Bogor dan *Masterplan Smart City* Kota Bogor;
b. Peningkatan infrastruktur pengelolaan TIK;
c. Integrasi data urusan pemerintahan daerah Kota Bogor;
d. Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
e. Peningkatan kapasitas SDM serta prasarana dan sarana untuk keamanan sistem informasi.

Untuk mengatasi tantangan pengembangan pelayanan perangkat daerah maka akan dilakukan analisa kemampuan internal dan mencari sumber serta potensi eksternal, baik dalam bentuk pendanaan, pengembangan kapasitas SDM maupun dalam pemanfaatan infrastruktur berbagi pakai di level nasional.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Bogor telah melakukan perubahan nomenklatur terhadap perangkat daerah yang ada, termasuk terbentuknya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor yang mengampu 3 (tiga) urusan wajib non pelayanan dasar yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu urusan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian. Hal ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025 - 2026.

Dalam rangka menggali isu-isu strategis yang dijadikan sebagai acuan penyusunan perubahan rencana strategis, maka perlu dicari permasalahan-permasalahan dari masing-masing urusan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor.

Tabel berikut menampilkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor yang dikelompokkan menurut pembagian urusan yang diselenggarakan.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Penyelenggaraan e-*Government* belum optimal	Tingkat keberlangsungan layanan pusat data belum stabil	Infrastruktur pusat data belum memenuhi standarisasi tier pusat data
		Belum optimalnya penyelenggaraan aplikasi di Kota Bogor	Semakin kompleksnya penyelenggaraan aplikasi

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		Belum seluruh unit kerja di Kota Bogor mendapatkan layanan jaringan infrastruktur telekomunikasi oleh pemerintah kota	Dari 377 unit kerja, baru terpasang jaringan FO sebanyak 141 titik.
			Layanan konektivitas dan jaringan belum stabil (bandwidth belum mencukupi).
		Belum semua PPID pelaksana melaksanakan keterbukaan informasi publik	Adanya rasa takut pejabat informasi publik terhadap dampak dari pelaksanaan keterbukaan informasi publik
2	Belum optimalnya penyelenggaraan Statistik Sektoral	Belum terpenuhinya kualitas data sesuai standar yang berlaku	Dalam penetapan aspek kualitas dan ketepatan waktu belum menggunakan standar/pedoman yang sama
3	Adanya ancaman terhadap keamanan aset informasi	Terjadinya insiden siber	Masih terdapat banyak celah kerentanan pada perangkat keamanan informasi

Sumber: Diskominfo Kota Bogor Tahun 2023

3.2. ACUAN ARAH PERENCANAAN

Perencanaan strategis perangkat daerah sebagaimana telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026 di mana dalam dokumen tersebut telah diuraikan isu-isu strategis pembangunan Kota Bogor untuk periode 2025-2026 yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok dalam pelaksanaan pembangunan Kota Bogor. Pembentukan isu-isu strategis di Kota Bogor didasarkan atas beberapa komponen yang telah dianalisis terkait hasil pembangunan yang ada di periode sebelumnya, seperti, telaah atas dokumen RPJPN 2025- 2045, RPJMN 2020-2024, dokumen RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026, dokumen RPJPD Kota Bogor 2005-2025, dokumen RPJMD Kota Bogor 2020-2024, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), isu internasional, dan lain sebagainya. Adapun Fokus Pembangunan Kota Bogor Tahun 2025-2026 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Fokus Pembangunan Kota Bogor Tahun 2025-2026

Tujuan	Fokus Pembangunan	
	2025	2026
	Tema: Penyiapan Sumber Daya Manusia Unggul dan Pelayanan Dasar yang Berkualitas	**Tema: Penguatan Daya Saing Sumberdaya Manusia untuk Menopang Daya Saing Daerah**
Terwujudnya	Penguatan kualitas pendidikan	Akselerasi pemerataan

Tujuan	Fokus Pembangunan	
	2025	2026
pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing.	dan kesehatan melalui pemerataan dan peningkatan kualitas sarana prasarana, tenaga pendidik/kesehatan, mengurangi siswa putus sekolah, menjamin pendidikan siswa miskin, memperkuat jaminan kesehatan, menurunkan stunting dan ODF, memastikan ketepatan sasaran intervensi program penanggulangan kemiskinan, memperkuat sistem perlindungan anak, lansia dan perempuan.	dan kualitas sarana prasarana pendidikan dan kesehatan, mengakselerasi intervensi penanggulangan kemiskinan, menurunkan stunting dan ODF, meningkatkan prestasi olahraga, meningkatkan kualitas pendidikan bagi penyandang disabilitas, serta meningkatkan prestasi olah raga pada Porprov 2026.
Terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan	Mendorong pengembangan potensi pariwisata heritage dan ilmiah, kampung tematik, ekonomi kreatif, penguatan sumberdaya manusia kreatif dan UMKM, mengakselerasi pelayanan investasi, mengembangkan sarana prasarana perekonomian, serta meningkatkan produktivitas	Memperkuat daya saing pariwisata, produk UMKM dan ekonomi kreatif, memperkuat Pendidikan vokasi ekonomi kreatif, meningkatkan kesempatan kerja yang inklusif dan melanjutkan pengembangan sarana prasarana perekonomian
Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang berkualitas dan ramah lingkungan yang mampu menunjang daya saing ekonomi daerah	Mengakselerasi penataan angkutan umum, melanjutkan pembangunan jalan, penuntasan integrasi jalur pedestrian di pusat-pusat kegiatan, memperkuat mitigasi dan penanggulangan bencana, mengakselerasi pengelolaan sampah di sumber timbulan, memperluas ruang terbuka hijau publik	Memperkuat penataan angkutan umum, melanjutkan meningkatkan pemerataan infrastruktur jalan yang berkualitas, memperkuat mitigasi dan penanggulangan bencana, memperkuat pengelolaan sampah di sumber timbulan, memperluas ruang terbuka hijau publik
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Penguatan zona Integritas di seluruh perangkat daerah, penguatan sistem kerja dan manajemen kinerja SDM, peningkatan kualitas perumusan kebijakan dan manajemen resiko, peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digitalisasi pelayanan, peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi dan penguatan riset dan inovasi daerah	Penguatan zona integritas di seluruh perangkat daerah, penguatan sistem kerja dan manajemen kinerja SDM, peningkatan kualitas perumusan kebijakan dan manajemen resiko, peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digitalisasi pelayanan, peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi dan penguatan riset dan inovasi daerah

Sumber: RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor memiliki peran pada pencapaian Fokus Pembangunan Kota Bogor Tahun 2025-2026 pada

tujuan 4 **“Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan”** dan sasaran berupa **“Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif”.**

3.3. TELAAHAN ISU STRATEGIS DALAM RPD KOTA BOGOR TAHUN 2025-2026

Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor yang memengaruhi pencapaian sasaran penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika berdasarkan RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Telaahan Isu Strategis Urusan Komunikasi dan Informatika pada RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Urusan
Belum terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan	Belum optimalnya peran BUMD	Kurangnya inovasi pemanfaatan teknologi informasi	Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Penelitian dan Pengembangan
Infrastruktur dan penataan ruang yang berkualitas dan ramah lingkungan yang mampu menunjang daya saing ekonomi daera	Infrastruktur dan penataan transportasi yang menunjang pengembangan potensi ekonomi loka	Belum optimalnya kapasitas dan kualitas infrastruktur telekomunikasi dan jaringan penerangan jalan umum	Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Perhubungan
Belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan	Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang lincah kolaboratif dan akuntabel	Belum optimalnya pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Urusan Komunikasi dan Informatika

Sumber: RPD Kota Bogor 2025-2026

Pada tabel analisis permasalahan RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026 sebagai penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah terdapat masalah pokok, masalah, dan akar masalah yang saling terkait dalam menganalisis sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika di Kota Bogor.

Masalah pokok pertama, yaitu belum terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan. Dalam hal ini upaya dalam pengentasan kemiskinan baik pada kebijakan, dan beragam program belum efektif. Selain itu dalam integrasi peran berbagai aktor pada lintas sektor dalam pengentasan kemiskinan masih belum optimal. Kemudian masih tingginya ketimpangan pendapatan. Dalam hal ini pendapatan dan pekerjaan masyarakat masih banyak yang kurang layak, padahal pengeluaran kebutuhan RT/kebutuhan dasar tinggi. Selain itu optimalisasi dalam kebijakan peningkatan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat bawah dan struktur pengupahan juga belum efektif dalam mengurangi ketimpangan pendapatan.

Masalah pokok kedua, yaitu belum meratanya pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang berkualitas dan ramah lingkungan. Padahal hal ini mampu menunjang daya saing ekonomi daerah. Konektivitas infrastruktur dan penataan transportasi yang menunjang pengembangan potensi ekonomi lokal, penyediaan layanan utilitas perkotaan dalam hal ini yaitu layanan akses penyediaan air minum dan air limbah yang layak dan aman, dan utilitas pencegahan serta pengendalian resiko bencana baik penanganan genangan dan banjir dan penyediaan ruang terbuka hijau publik sesuai dengan rencana tata ruang kota belum optimal.

Masalah pokok ketiga, yaitu belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan, dalam hal ini pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang lincah kolaboratif dan akuntabel belum terwujud, baik dalam pelaksanaan sistem pemerintahannya yang belum berbasis elektronik, akuntabilitas kinerja pemerintah, maupun akuntabilitas keuangan pemerintah. Selain itu budaya birokrasi yang berorientasi pelayanan juga belum optimal.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang wilayah daerah kota adalah mewujudkan ruang daerah kota sebagai kota jasa dan permukiman

dengan tetap mempertahankan ciri khasnya sebagai Kota Pusaka yang berwawasan lingkungan.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah dimaksud ditetapkan strategi pemanfaatan ruang wilayah meliputi:

1. kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang;
2. kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang;
3. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis.

Program Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor dalam Renstra telah dianalisis dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada tahap Rancangan Awal Perubahan RPJMD. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, memiliki tugas untuk menindaklanjuti salah satu rekomendasi KLHS, yakni langganan *broadband* internet tetap menurut tingkat kecepatannya dan jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui *website*.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor dalam menanggapi isu rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis telah merancang dan menyusun berbagai program/kegiatan berasaskan pada peningkatan jangkauan pelayanan komunikasi, informatika, statistik dan persandian sesuai dengan tugas dan fungsinya antara lain: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan *e-Government* di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota; Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil reviu terhadap:

1. Gambaran pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor;
2. Analisa berbagai kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor;

3. Sasaran jangka menengah pada RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor dirumuskan isu strategis dalam pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor melalui proses identifikasi permasalahan menurut bidang dan pembagian urusan konkruen pemerintah daerah yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor sebagai berikut:
   - Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
   - Kebijakan pengembangan *Smartcity* di Indonesia melalu program Gerakan Menuju 100 *Smartcity* Indonesia;
   - Belum adanya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Urusan Konkruen Komunikasi dan Informatika dari Kementerian Komunikasi dan Informatika;
   - Infrastruktur layanan konektivitas dan jaringan dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Kota Cerdas sesuai dengan Standar Nasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
   - Integrasi layanan pengaduan non-kedaruratan dan kedaruratan harus dilakukan untuk mengatasi adanya kesenjangan layanan pengaduan masyarakat;
   - Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, mengamanatkan bahwa urusan statistik serumpun pada urusan komunikasi dan informatika dan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang statistik. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah, harus menjadi satu-satunya sumber data dan informasi statistik sektoral bagi kebutuhan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan daerah;
   - Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, mengamanatkan bahwa urusan persandian serumpun pada urusan komunikasi dan informatika dan wajib menyelenggarakan penjaminan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dalam menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah pada penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2025-2026 ini mengacu pada Rencanan Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor Tahun 2025-2026 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tujuan dan sasaran jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, dapat dilihat pada Tabel 4.1. di bawah ini:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-	
				2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	88,73	88,73
			Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	95	95
			Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda	100	100
			Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi > 100)	≥ 1	≥ 1

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-	
				2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah	88,75	89,25
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan keterbukaan informasi publik	Predikat Penerapan Keterbukaan Informasi Publik	Menuju Informatif	Menuju Informatif
		Terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Nilai Domain Kebijakan SPBE	3,70	3,70
			Nilai Domain Tata Kelola SPBE	3,40	3,40
			Nilai Domain Manajemen SPBE	2,91	2,91
		Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan data statistik sectoral	Indeks Pembangunan Statistik	2,73	2,75
		Terwujudnya Peningkatan Kualitas Penerapan Persandian dan Sistem Pengamanan Informasi	Capaian Kinerja Keamanan Informasi	Level 2	Level 2

Sumber: Diskominfo Kota Bogor Tahun 2024

Alur penetapan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.1
Alur Penetapan Tujuan dan Sasaran Renstra Diskominfo Tahun 2025-2026

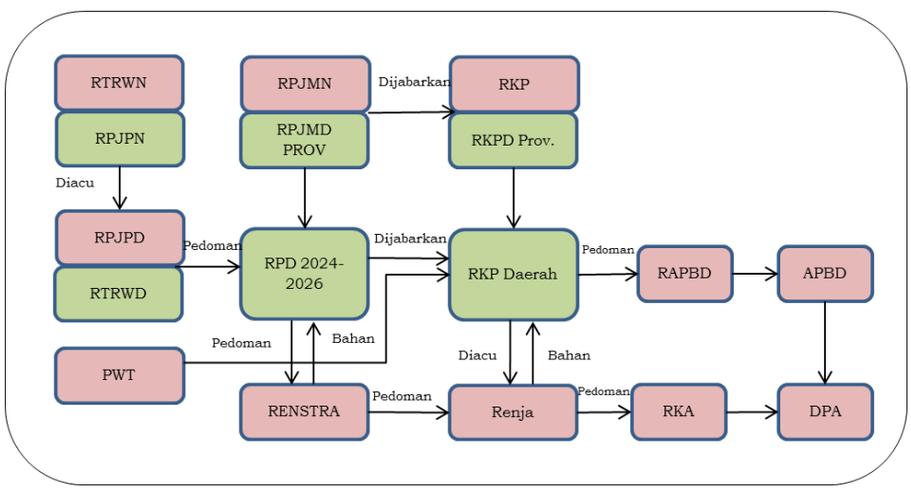

Sumber: RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026

4.2. PENJENJANGAN KINERJA RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR TAHUN 2025-2026

Gambar 4.2 Penjenjangan Kinerja Tujuan 1 Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2025-2026

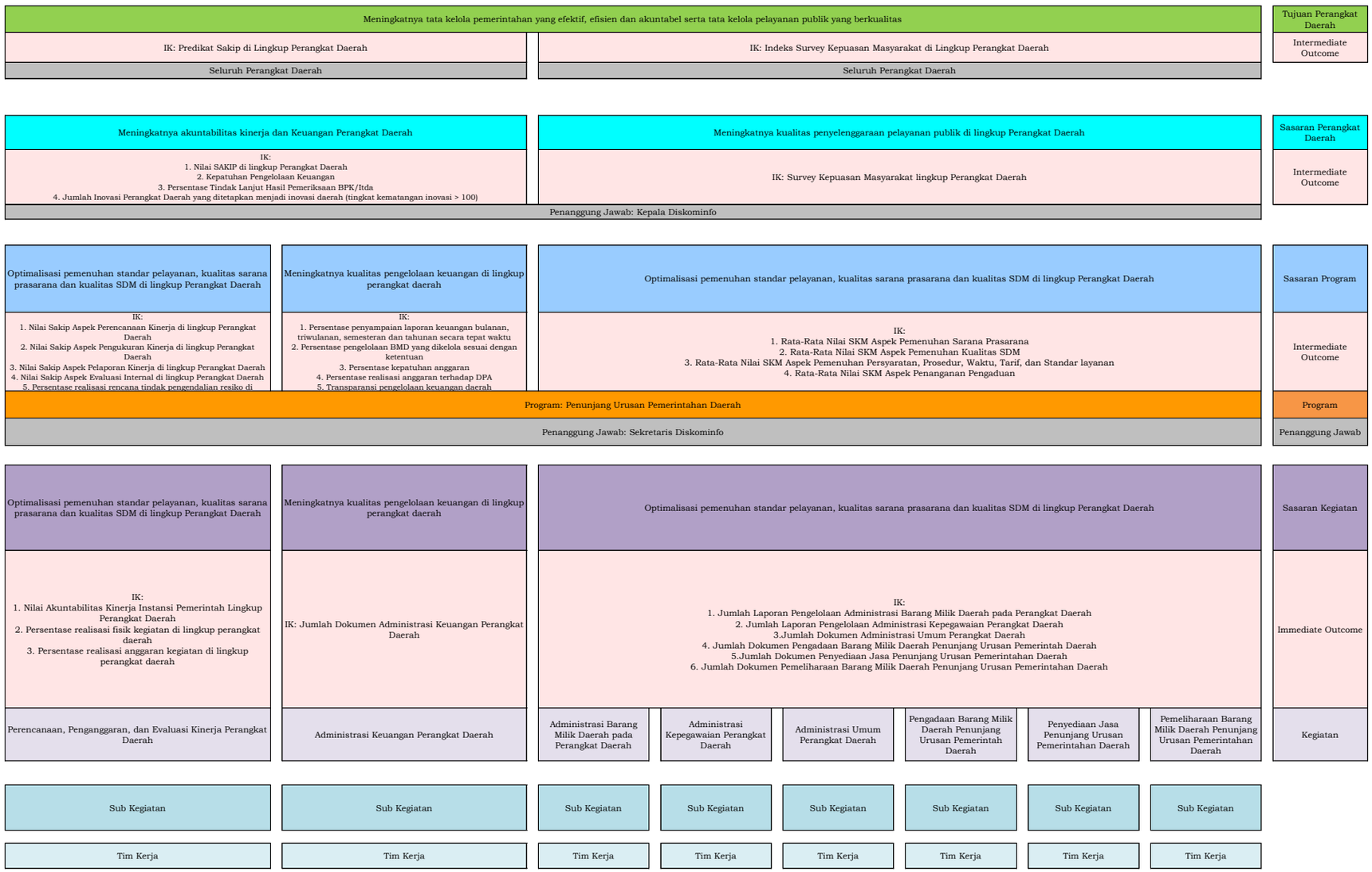

Gambar 4.3 Penjenjangan Kinerja Tujuan 2 Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2025-2026

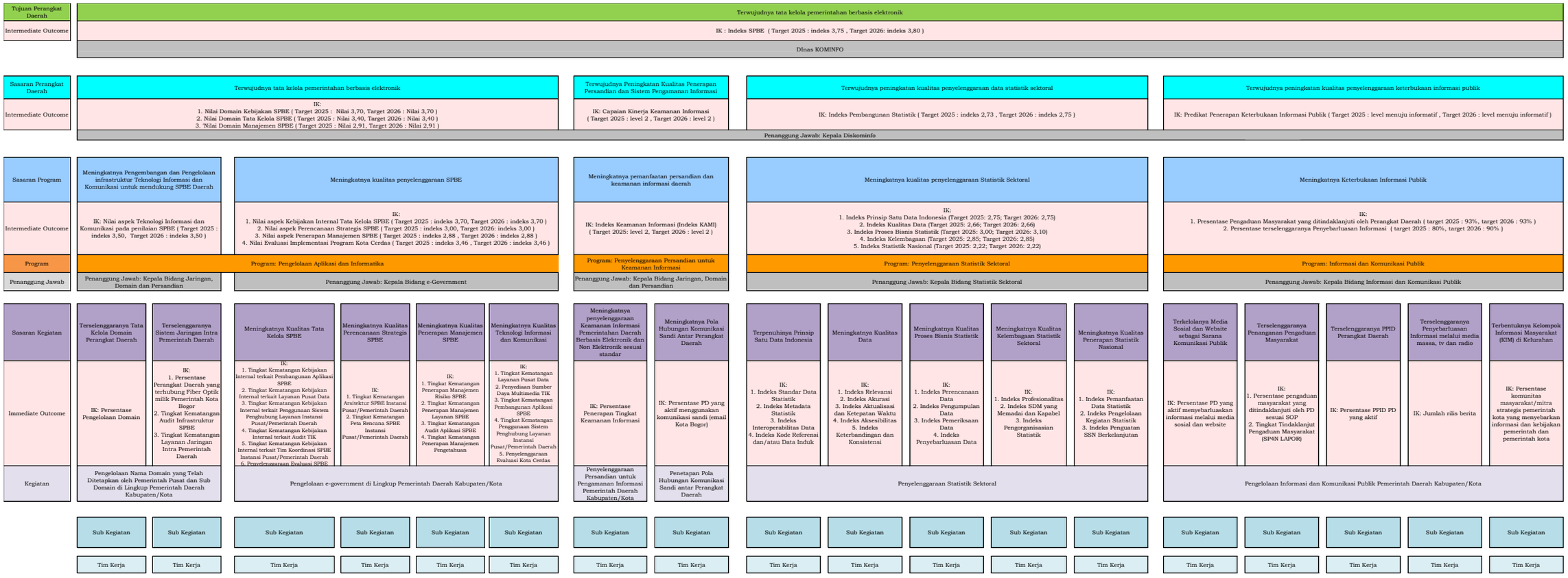

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Dalam mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika, diperlukan langkah-langkah strategi dan kebijakan. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dengan dipertegas adanya arah kebijakan yang dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 5.1
Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Mengimplementasikan sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan dan terukur	Mewajibkan seluruh PPK dan PPTK untuk menyusun dan mengunggah laporan kinerja dan keuangan secara berkala pada SIPD, SIMRAL Kota Bogor, dan sistem monitoring dan evaluasi yang diwajibkan
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah	Merumuskan dan mengimplementasikan inovasi/upaya peningkatan penyediaan fasilitas pelayanan publik	Mengalokasikan dana secara proporsional untuk peningkatan kualitas pelayanan publik
Terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan keterbukaan informasi public	Melaksanakan monitoring dan evaluasi PPID secara berkala	Mewajibkan seluruh PPID pelaksana untuk mempublikasikan informasi melalui web PPID masing-masing perangkat daerah
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Meningkatkan kestabilan pelayanan pusat data	1. Mengoptimalkan layanan pusat data nasional 2. Mempertahankan dan meningkatkan layanan pusat data dengan collocation 3. Mendorong pembangunan pusat data mandiri
		Meningkatkan kapasitas dan kualitas tata kelola kelembagaan	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM talenta digital
	Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan	Melakukan reviu dan evaluasi penyelenggaraan Statistik Sektoral secara berkala serta	Menyusun regulasi perwali tentang penyelenggaran Statistik Sektoral Kota Bogor

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
	data statistik sectoral	ditindaklanjuti untuk peningkatan kualitas secara berkesinambungan.	
	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Penerapan Persandian dan Sistem Pengamanan Informasi	Menerapkan standar nasional (SNI 27001) untuk keamanan informasi	Mewajibkan seluruh perangkat daerah untuk menerapkan perwali No. 23 Tahun 2021 tentang SMKI (Sistem Manajemen Keamanan Informasi)

Sumber: Diskominfo Kota Bogor Tahun 2023

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka perlu dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

Disamping adanya perubahan RPJMD Kota Bogor, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor .... Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan serta sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor sesuai dengan pendanaan indikatif ditetapkan sebagai berikut:

1. ***Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral***
    1) Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
        a. Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral;
        b. Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional;
        c. Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral;
        d. Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia;
        e. Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar.
2. ***Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi***
    1) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
        a. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
        b. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

c. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik;
d. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2) Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah
a. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
h. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah;
i. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah;
j. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
k. Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD;
l. Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu;
m. Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan.

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;

g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD;
d. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD;
e. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
f. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
g. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD.

4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
b. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
c. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
d. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian;
e. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
f. Pemulangan Pegawai yang Pensiun;
g. Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas;
h. Pemindahan Tugas ASN;
i. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi;
j. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
k. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
g. Penyediaan Bahan/Material;
h. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
j. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;

k. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
   b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
   c. Pengadaan Alat Besar;
   d. Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor;
   e. Pengadaan Mebel;
   f. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
   g. Pengadaan Aset Tetap Lainnya;
   h. Pengadaan Aset Tak Berwujud;
   i. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
   j. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
   k. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
   c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
   d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
   b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
   c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar;
   d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor;
   e. Pemeliharaan Mebel;
   f. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
   g. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
   h. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud;
   i. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

j. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
k. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
l. Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah.

4. Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika

1) Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   a. Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa.
2) Pengelolaan *e-Government* di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   a. Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional;
   b. Koordinasi penyusunan proses bisnis;
   c. Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda;
   d. Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah;
   e. Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi;
   f. Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah;
   g. Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE;
   h. Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah;
   i. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah;
   j. Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah;
   k. Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas;
   l. Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota;
   m. Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi;
   n. Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo;
   o. Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas;

p. Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE;
q. Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE;
r. Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE.

5. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

1) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   a. Relasi Media;
   b. Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat;
   c. Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
   d. Pelayanan Informasi Publik;
   e. Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
   f. Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik;
   g. Diseminasi Informasi;
   h. Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
   i. Penyusunan Strategi Komunikasi Publik;
   j. Penyusunan Konten;
   k. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik.

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan serta sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Sasaran	kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Kondisi Awal (2023)	RPD				Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2025		2026					
							Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tujuan 1: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas				Predikat SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	Nilai	A	A	13.490	A	15.490	A	28.980	Diskominfo Kota Bogor	Diskominfo Kota Bogor
	Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah			Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	Nilai	88,72	88,73		88,73		88,73		Diskominfo Kota Bogor	Diskominfo Kota Bogor
				Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi > 100)	Inovasi/tahun/PD	3	≥1	100	≥1	100	≥1	200		
				Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	%	NA	95	13.390	95	15.390	95	28.780		
				Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda	%	100	100		100		100			
		2 16 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	Nilai	27,57	27,57	100	27,57	100	27,57	200	Diskominfo Kota Bogor	Diskominfo Kota Bogor
				Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	Nilai	27,00	27,00		27,00		27,00			
				Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	Nilai	11,65	11,65		11,65		11,65			
				Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	Nilai	22,50	22,50		22,50		22,50			
				Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	%	NA	100		100		100			
				Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	%	100	100	13.390	100	15.390	100	28.780		
				Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	%	NA	94		94		94			
				Persentase kepatuhan anggaran	%	NA	100		100		100			
				Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	%	NA	95		95		95			

Tujuan	Sasaran	kode Rekening						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Kondisi Awal (2023)	RPD				Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
												2025		2026					
												Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									Transparansi pengelolaan keuangan daerah	%	NA	94		94		94			
		2	16	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	A	A	100	A	100	A	200	Diskominfo Kota Bogor	Diskominfo Kota Bogor
									Persentase realisasi fisik kegiatan di lingkup perangkat daerah	%	NA	95		95		95			
									Persentase realisasi anggaran kegiatan di lingkup perangkat daerah	%	NA	95		95		95			
		2	16	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	9	65	9	65	18	130	Diskominfo Kota Bogor	Diskominfo Kota Bogor
		2	16	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3	35	3	35	3	70		
		2	16	01	2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	7	0	7	0	7	0		
		2	16	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	13.390	1	15.390	1	28.780	Diskominfo Kota Bogor	Diskominfo Kota Bogor
		2	16	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	59	65	13.305	65	15.300	65	28.605	Diskominfo Kota Bogor	Diskominfo Kota Bogor
		2	16	01	2	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	NA	12	10	12	15	12	25		
		2	16	01	2	02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	1	5	1	5	1	10		

Tujuan	Sasaran	kode Rekening						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Kondisi Awal (2023)	RPD				Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
												2025		2026					
												Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		2	16	01	2	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	NA	12	70	12	70	12	140		
									Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah	Indeks	3,53	3,55	9.885	3,57	9.010	3,57	18.895	Diskominfo Kota Bogor	Diskominfo Kota Bogor
	Sasaran 2: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah								Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah	Nilai	88,25	88,75	9.885	89,25	9.010	89,25	18.895	Diskominfo Kota Bogor	Diskominfo Kota Bogor
								Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana dan Prasarana	Nilai	83,75	85,00	5.870	85,00	4.875	85,00	10.745	Diskominfo Kota Bogor	Diskominfo Kota Bogor
									Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM	Nilai	80,00	81,25	100	82,50	110	82,50	210		
									Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	Nilai	82,25	82,50	1.325	82,75	1.375	82,75	2.700		
									Rata-Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	Nilai	94,50	95,00	2.590	95,25	2.650	95,25	5.240		
		2	16	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	1	0	1	0	1	0	Diskominfo Kota Bogor	Diskominfo Kota Bogor
		2	16	01	2	03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	2	0	2	0	2	0	Diskominfo Kota Bogor	Diskominfo Kota Bogor
		2	16	01	2	03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	12	0	12	0	12	0		
		2	16	01	2	03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	12	0	12	0	12	0		
		2	16	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	1	1	100	1	110	1	210	Diskominfo Kota Bogor	Diskominfo Kota Bogor
		2	16	01	2	05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	0	1	0	1	0	Diskominfo Kota Bogor	Diskominfo Kota Bogor

Tujuan	Sasaran	kode Rekening						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Kondisi Awal (2023)	RPD				Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
												2025		2026					
												Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		2	16	01	2	05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	0	1	0	1	0		
		2	16	01	2	05	0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1	0	1	0	1	0		
		2	16	01	2	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	38	65	0	65	0	65	0		
		2	16	01	2	05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	48	65	100	65	110	65	210		
		2	16	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	NA	1	1.325	1	1.375	1	2.700	Diskominfo Kota Bogor	Diskominfo Kota Bogor
		2	16	01	2	06	0001	Penyediaan Kompo-nen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	25	1	25	1	50	Diskominfo Kota Bogor	Diskominfo Kota Bogor
		2	16	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	250	5	300	5	550		
		2	16	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	50	1	50	1	100		
		2	16	01	2	06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	0	1	0	1	0		
		2	16	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	1.000	1	1.000	1	2.000		
		2	16	01	2	06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	0	1	0	1	0		
		2	16	01	2	06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	0	1	0	1	0		

Tujuan	Sasaran	kode Rekening						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Kondisi Awal (2023)	RPD				Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
												2025		2026					
												Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		2	16	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	NA	1	5.060	1	3.760	1	8.820	Diskominfo Kota Bogor	Diskominfo Kota Bogor
		2	16	01	2	07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	NA	1	600	0	0	1	600	Diskominfo Kota Bogor	Diskominfo Kota Bogor
		2	16	01	2	07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	NA	1	450	1	450	2	900		
		2	16	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	NA	62	3.410	30	2.460	92	5.870		
		2	16	01	2	07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	NA	4	300	4	500	4	800		
		2	16	01	2	07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	NA	171	300	86	350	257	650		
		2	16	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	NA	1	2.590	1	2.650	1	5.240	Diskominfo Kota Bogor	Diskominfo Kota Bogor
		2	16	01	2	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	0	1	0	1	0	Diskominfo Kota Bogor	Diskominfo Kota Bogor
		2	16	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	10	1	10	1	20		
		2	16	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	2.580	1	2.640	1	5.220		
		2	16	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	2	2	810	2	1.115	2	1.925	Diskominfo Kota Bogor	Diskominfo Kota Bogor

Tujuan	Sasaran	kode Rekening						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Kondisi Awal (2023)	RPD				Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
												2025		2026					
												Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		2	16	01	2	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	13	13	320	15	430	15	750	Diskominfo Kota Bogor	Diskominfo Kota Bogor
		2	16	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	150	70	150	85	150	155		
		2	16	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	NA	1	420	1	600	1	1.020		
Tujuan 2: Terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik									Indeks SPBE	Indeks	3,72	3,75	35.145	3,80	36.038	3,80	71.183	Diskominfo Kota Bogor	Diskominfo Kota Bogor
	Sasaran 1: Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan keterbukaan informasi publik								Predikat Penerapan Keterbukaan Informasi Publik	Level	Menuju Informatif	Menuju Informatif	6.790	Menuju Informatif	6.890	Menuju Informatif	13.680	Diskominfo Kota Bogor	Diskominfo Kota Bogor
		2	16	02				Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindak-lanjuti oleh Perangkat Daerah	%	92,58	93	785	93	835	93	1.620	Diskominfo Kota Bogor	Diskominfo Kota Bogor
									Persentase terselenggaranya Penyebarluasan Informasi	%	90	80	6.005	90	6.055	90	12.060		
		2	16	02	2	01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PD yang aktif menyebarluaskan informasi melalui media internal, media sosial dan website	%	100	100	1.626	100	1.626	100	3.252	Diskominfo Kota Bogor	Diskominfo Kota Bogor
									Persentase pengaduan masyara-kat yang ditindaklanjuti oleh PD	%	92,58	94	200	94	200	94	400		
									Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	%	96,73	93	585	93	635	93	1.220		
									Persentase PPID PD yang aktif	%	100	90	116	90	116	90	232		
									Jumlah Kemitraan Media Cetak, Online, Radio dan TV	Tayang	872	500	3.513	600	3.563	1100	7.076		
									Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota	%	75	90	750	90	750	90	1.500		

Tujuan	Sasaran	kode Rekening						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Kondisi Awal (2023)	RPD				Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
												2025		2026					
												Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		2	16	02	2	01	0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3 aktif dalam kegiatan relasi media	Laporan	39	12	250	12	300	24	550	Diskominfo Kota Bogor	Diskominfo Kota Bogor
		2	16	02	2	01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Komunitas	50	68	150	68	150	68	300		
		2	16	02	2	01	0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	16	10	16	10	16	20	32		
		2	16	02	2	01	0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Persentase	NA	100	100	100	100	100	200		
		2	16	02	2	01	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	NA	1	585	1	635	2	1.220		
		2	16	02	2	01	0020	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Persentase	86,07	86,07	226	86,07	226	86,07	452		
		2	16	02	2	01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	8	8	3.463	8	3.463	8	6.926		
		2	16	02	2	01	0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Dokumen	1	1	800	1	800	2	1.600		
		2	16	02	2	01	0023	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Konten	19	12	600	12	600	24	1.200		
		2	16	02	2	01	0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Orang	NA	150	600	150	600	150	1.200		
	Sasaran 2: Terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik								Nilai Domain Kebijakan SPBE	Nilai	3,70	3,70	0	3,70	450	3,70	450	Diskominfo Kota Bogor	Diskominfo Kota Bogor
									Nilai Domain Tata Kelola SPBE	Nilai	3,40	3,40	23.523,5	3,40	23.749,3	3,40	47.273		
									Nilai Domain Manajemen SPBE	Nilai	2,91	2,91	977	2,91	1.038	2,91	2.015		
		2	16	03				Program Pengelolaan	Nilai aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi pada penilaian SPBE	Indeks	3,50	3,50	22.987,5	3,50	23.689,3	3,50	46.677	Diskominfo Kota Bogor	Diskominfo Kota Bogor

Tujuan	Sasaran	kode Rekening						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Kondisi Awal (2023)	RPD				Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
												2025		2026					
												Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								Aplikasi Informatika	Nilai aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	Indeks	3,70	3,70	0	3,70	450	3,70	450		
									Nilai aspek Perencanaan Strategis SPBE	Indeks	3,00	3,00	536	3,00	60	3,00	596		
									Nilai aspek Penerapan Manajemen SPBE	Indeks	2,88	2,88	194,5	2,88	213	2,88	408		
									Nilai Evaluasi Implementasi Program Kota Cerdas	Indeks	3,35	3,46	782,5	3,46	825	3,46	1.608		
		2	16	03	2	01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Domain	%	100	100	500	100	550	100	1.050	Diskominfo Kota Bogor	Diskominfo Kota Bogor
		2	16	03	2	01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Dokumen	NA	1	500	1	550	1	1.050	Diskominfo Kota Bogor	Diskominfo Kota Bogor
		2	16	03	2	02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Pembangunan Aplikasi SPBE	Level	4	3	0	3	450	3	450	Diskominfo Kota Bogor	Diskominfo Kota Bogor
									Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Layanan Pusat Data	Level	4	3		3		3			
									Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Level	4	3		3		3			
									Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Audit TIK	Level	4	3		3		3			
									Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Level	3	3		3		3			
									Penyelenggaraan Evaluasi SPBE	Dokumen	2	2	372,5	2	415	2	788		

Tujuan	Sasaran	kode Rekening						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Kondisi Awal (2023)	RPD				Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
												2025		2026					
												Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Level	3	2	536	2	60	2	596		
									Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Level	3	2		2		2			
									Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	Level	3	4	73	4	82	4	155		
									Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	Level	3	4		4		4			
									Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	Level	3	3	36,5	3	41	3	77,5		
									Tingkat Kematangan Audit Aplikasi SPBE	Level	3	2	85	2	90	2	175		
									Tingkat Kematangan Audit Infrastruktur	Level	3	2		2		2			
									Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	Level	3	3	2.252	3	2.571,5	3	4.824		
									Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	Level	4	3	1.244,5	3	1.449,8	3	2.694		
									Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Level	4	2	108	2	109	2	217		
									Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Level	3	4	18.883	4	19.009	4	37.892		
									Penyelenggaraan Evaluasi Kota Cerdas	Indeks	3,35	3,46	410	3,46	410	3,46	820		
		2	16	03	2	02	0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Laporan	NA	4	277	4	315	8	592	Diskominfo Kota Bogor	Diskominfo Kota Bogor
		2	16	03	2	02	0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	Dokumen	NA	3	2.252	3	2.571,5	3	4.823,5		
		2	16	03	2	02	0017	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	Dokumen	NA	1	36,5	1	41	2	77,5		
		2	16	03	2	02	0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur	Dokumen	NA	1	536	1	510	2	1.046		

Tujuan	Sasaran	kode Rekening						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Kondisi Awal (2023)	RPD				Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
												2025		2026					
												Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								rencana SPBE Pemerintah Daerah	dan peta rencana yang diusulkan										
		2	16	03	2	02	0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Dokumen	NA	1	73	1	82	2	155,0		
		2	16	03	2	02	0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi	NA	15	1.244,5	15	1.449,8	15	2.694,3		
		2	16	03	2	02	0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	34	4	108	4	109	42	217		
		2	16	03	2	02	0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasi-kan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membi-dangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	Dokumen	NA	1	96	1	100	2	196		
		2	16	03	2	02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Perangkat Daerah	36	36	6.883	36	7.009	36	13.892		
		2	16	03	2	02	0026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Dokumen	2	2	85	2	90	4	175		
		2	16	03	2	02	0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupa-ten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	Program	NA	3	410	3	410	6	820		

Tujuan	Sasaran	kode Rekening						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Kondisi Awal (2023)	RPD				Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
												2025		2026					
												Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		2	16	03	2	02	0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penye-lenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	36	36	12.000	36	12.000	36	24.000		
	Sasaran 3: Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan data statistik sektoral								Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	2,60	2,73	1.208	2,75	1.260	2,75	2.468	Diskominfo Kota Bogor	Diskominfo Kota Bogor
		2	20	2				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Prinsip Satu Data Indonesia	Indeks	2,50	2,75	100	2,75	110	2,75	210	Diskominfo Kota Bogor	Diskominfo Kota Bogor
									Indeks Kualitas Data	Indeks	2,59	2,66	460	2,66	345	2,66	805		
									Indeks Proses Bisnis Statistik	Indeks	2,79	3,00	75	3,10	80	3,10	155		
									Indeks Kelembagaan	Indeks	2,85	2,85	473	2,85	525	2,85	998		
									Indeks Statistik Nasional	Indeks	2,22	2,22	100	2,22	200	2,22	300		
		2	20	02	2	01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Standar Data Statistik	Indeks	3,00	3,00		3,00		3,00		Diskominfo Kota Bogor	Diskominfo Kota Bogor
									Indeks Metadata Statistik	Indeks	3,00	3,00		3,00		3,00			
									Indeks Interoperabilitas Data	Indeks	3,00	3,00	100	3,00	110	3,00	210		
									Indeks Kode Referensi dan/atau Data Induk	Indeks	1,00	2,00		2,00		2,00			
									Indeks Relevansi	Indeks	2,40	2,40		2,40		2,40			
									Indeks Akurasi	Indeks	3,00	3,00		3,00		3,00			
									Indeks Aktualisasi dan Ketepatan Waktu	Indeks	2,50	2,50	460	2,50	345	2,50	805		
									Indeks Aksesibilitas	Indeks	2,67	3,00		3,00		3,00			
									Indeks Keterbandingan dan Konsistensi	Indeks	2,50	2,50		2,50		2,50			
									Indeks Perencanaan Data	Indeks	2,33	2,33		2,67		2,67			
									Indeks Pengumpulan Data	Indeks	3,00	3,00	75	3,00	80	3,00	155		
									Indeks Pemeriksaan Data	Indeks	3,00	4,00		4,00		4,00			
									Indeks Penyebarluasan Data	Indeks	3,00	3,00		3,00		3,00			
									Indeks Profesionalitas	Indeks	3,00	3,00		3,00		3,00			
									Indeks SDM yang Memadai dan Kapabel	Indeks	2,50	2,50	473	2,50	525	2,50	998		
									Indeks Pengorganisasian Statistik	Indeks	3,00	3,00		3,00		3,00			
									Indeks Pemanfaatan Data Statistik	Indeks	2,67	2,67		2,67		2,67			
									Indeks Pengelolaan Kegiatan Statistik	Indeks	2,00	2,00	100	2,00	200	2,00	300		
									Indeks Penguatan SSN Berkelanjutan	Indeks	1,99	1,99		1,99		1,99			

Tujuan	Sasaran	kode Rekening						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Kondisi Awal (2023)	RPD				Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
												2025		2026					
												Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		2	20	02	2	01	0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang	60	80	473	80	525	80	998	Diskominfo Kota Bogor	Diskominfo Kota Bogor
		2	20	02	2	01	0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Persentase	100	100	100	100	200	100	300		
		2	20	02	2	01	0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Persentase	NA	80	460	85	345	85	805		
		2	20	02	2	01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dokumen	1	2	100	2	110	4	210		
		2	20	02	2	01	0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Dokumen	NA	1	75	1	80	1	155		
	Sasaran 4: Terwujudnya Peningkatan Kualitas Penerapan Persandian dan Sistem Pengamanan Informasi								Capaian Kinerja Keamanan Informasi	Level	2	2	2.646,5	2	2.651	2	5.298	Diskominfo Kota Bogor	Diskominfo Kota Bogor
		2	21	02				Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Level	2	2	2.646,5	2	2.651	2	5.298	Diskominfo Kota Bogor	Diskominfo Kota Bogor
		2	21	02	2	01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerapan Tingkat Keamanan Informasi	%	81	79	2.496,5	80	2.501	80	4.998	Diskominfo Kota Bogor	Diskominfo Kota Bogor
		2	21	02	2	01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	1	1	300	1	300	3	600	Diskominfo Kota Bogor	Diskominfo Kota Bogor

Tujuan	Sasaran	kode Rekening						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Kondisi Awal (2023)	RPD				Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
												2025		2026					
												Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		2	21	02	2	01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	10	1	10	2	20		
		2	21	02	2	01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1	1	1.536,5	1	1.541	1	3.077,5		
		2	21	02	2	01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	36	36	650	36	650	36	1.300		
		2	21	02	2	02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PD yang aktif menggunakan komunikasi sandi (email Kota Bogor)	%	94	97	150	100	150	100	300	Diskominfo Kota Bogor	Diskominfo Kota Bogor
		2	21	02	2	02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	34	35	150	36	150	36	300	Diskominfo Kota Bogor	Diskominfo Kota Bogor

Sumber: Diskominfo Kota Bogor Tahun 2024

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran serta merupakan ikhtisar hasil berbagai program untuk penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Lebih jelasnya dalam penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Bogor dalam urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian dan urusan statistik sebagaimana dituangkan dalam RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah ditentukan dari pencapaian indikator tujuan dan indikator sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dari perangkat daerah. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan informatika memiliki 3 indikator tujuan, 11 Indikator Kinerja Utama, dan 15 Indikator Kinerja Kunci yang tersebar dalam 3 penyelenggaraan urusan kinerja kunci.

Indikator kinerja kunci (IKK) untuk masing-masing urusan yang diampunya yaitu urusan Komunikasi dan Informatika sebanyak 7 IKK, urusan Statistik sebanyak 6 IKK dan urusan Persandian sebanyak 2 IKK. Sedangkan indikator program yang akan dicapai melalui penyelenggaraan kegiatan dan sub kegiatan terdiri dari 27 Indikator Program.

Berikut ditampilkan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Tahun 2025 - 2026.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD (2023)	Target		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2025	2026	
I	**INDIKATOR TUJUAN**					
1	Predikat SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	Nilai	A	A	A	A
2	Indeks Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah	Indeks	3,53	3,55	3,57	3,57
3	Indeks SPBE	Indeks	3,72	3,75	3,80	3,80
II	**INDIKATOR SASARAN (INDIKATOR KINERJA UTAMA)**					
1	Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	Nilai	88,72	88,73	88,73	88,73
2	Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	%	NA	95	95	95
3	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda	%	100	100	100	100
4	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi > 100)	Inovasi/tahun/PD	3	≥ 1	≥ 1	≥ 1
5	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah	Nilai	88,25	88,75	89,25	89,25
6	Predikat Penerapan Keterbukaan Informasi Publik	Level	Menuju Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif
7	Nilai Domain Kebijakan SPBE	Nilai	3,70	3,70	3,70	3,70
8	Nilai Domain Tata Kelola SPBE	Nilai	3,40	3,40	3,40	3,40
9	Nilai Domain Manajemen SPBE	Nilai	2,91	2,91	2,91	2,91
10	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	2,60	2,73	2,75	2,75
11	Capaian Kinerja Keamanan Informasi	Level	2	2	2	2

Sumber: Diskominfo Kota Bogor Tahun 2023

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD (2023)	Target		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2025	2026	
I	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**					
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Persen	94	95	97	97
2	Hasil Penilaian SPBE	Indeks	3,72	3,75	3,80	3,80
3	Persentase data urusan pemerintah daerah Kota Bogor yang terintegrasi	Persen	37	43	47	47
4	Persentase Keterbukaan Informasi Publik	Persen	86,4	80	80	80
	Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Predikat	Menuju Informatif	Menuju Informatif (80 – 89,9)	Menuju Informatif (80 – 89,9)	Menuju Informatif (80 – 89,9)
5	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100	100	100	100
6	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	100	100	100	100
7	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran publik, untuk mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Persen	86,07	86,50	87	87
	URUSAN STATISTIK					
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Data basis pembangunan daerah	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku “Kota Bogor Dalam Angka”	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Buku “PDRB”	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100

No	Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD (2023)	Target		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2025	2026	
6	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100
	URUSAN PERSANDIAN					
1	Persentase Unit Kerja melaksanakan pola hubungan komunikasi sandi dengan email daerah	Persen	86	91	92	92
2	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	81	82	82	82
II	**INDIKATOR PROGRAM**					
1	Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	Nilai	27,57	27,57	27,57	27,57
2	Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	Nilai	27,00	27,00	27,00	27,00
3	Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	Nilai	11,65	11,65	11,65	11,65
4	Nilai Sakip Aspek Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal di lingkup Perangkat Daerah	Nilai	22,50	22,50	22,50	22,50
5	Persentase realisasi rencana tindak pengendalian risiko di lingkungan perangkat daerah	%	NA	100	100	100
6	Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	%	100	100	100	100
7	Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	%	NA	94	94	94
8	Persentase kepatuhan anggaran	%	NA	100	100	100
9	Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	%	NA	95	95	95
10	Transparansi pengelolaan keuangan daerah	%	NA	94	94	94
11	Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana	Nilai	83,75	85,00	85,00	85,00
12	Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM	Nilai	80,00	81,25	82,50	82,50
13	Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan	Nilai	82,25	82,50	82,75	82,75

No	Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD (2023)	Target		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2025	2026	
14	Rata-Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	Nilai	94,50	95,00	95,25	95,25
15	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah	%	92,58	93	93	93
16	Persentase terselenggaranya Penyebarluasan Informasi	%	90	80	90	90
17	Nilai aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi pada penilaian SPBE	Indeks	3,50	3,50	3,50	3,50
18	Nilai aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	Indeks	3,70	3,70	3,70	3,70
19	Nilai aspek Perencanaan Strategis SPBE	Indeks	3,00	3,00	3,00	3,00
20	Nilai aspek Penerapan Manajemen SPBE	Indeks	2,88	2,88	2,88	2,88
21	Nilai Evaluasi Implementasi Program Kota Cerdas	Indeks	3,35	3,46	3,46	3,46
22	Indeks Prinsip Satu Data Indonesia	Indeks	2,50	2,75	2,75	2,75
23	Indeks Kualitas Data	Indeks	2,59	2,66	2,66	2,66
24	Indeks Proses Bisnis Statistik	Indeks	2,79	3,00	3,10	3,10
25	Indeks Kelembagaan	Indeks	2,85	2,85	2,85	2,85
26	Indeks Statistik Nasional	Indeks	2,22	2,22	2,22	2,22
27	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Level	2	2	2	2

Sumber: Diskominfo Kota Bogor Tahun 2023

BAB VIII
PENUTUP

Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya untuk mencapai strategi tersebut melalui berbagai teknik analisis, salah satu diantaranya analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2025-2026 dengan mempertimbangkan lingkungan strategis berdasarkan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2025-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2025-2026.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 285 ayat (1) dan Pasal 285 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026. Dan Kepala Perangkat Daerah harus melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Pejabat Wali Kota melalui Kepala Bapperida Kota Bogor untuk sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026.

Demikian penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, dan Informatika Kota Bogor Tahun 2025-2026 agar dapat dijadikan sebagai alat perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pertanggungjawaban dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.

WALI KOTA BOGOR,

TTD

BIMA ARYA